

Interview: Olly Dondokambey / “Sumbu Pendek” Sudirman Said

AKTUAL

Edisi 44 | 16 - 30 November 2015

Trap-Pacific Partnership

Ini bukan sekedar perdagangan yang *fair*,
tapi tentang kontrol perusahaan multi-nasional
terhadap sebuah negara.



ISSN 2337-8395



Rp. 30.000

WWW.AKTUAL.COM



Berita teraktual tersaji,
untuk Anda mengawali hari ...

Info Dan Pemasaran :

☎ 0812 053 8776 (Deddy) | 0838 210 4469 (Ranie) | 0818 2809 41 009 (Rhiza)

✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

🌐 www.aktual.com

PENDIRI M Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif
PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony
REDAKTUR Ferro Maulana, Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan
STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Buttho, Maulana Khamal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Muhammad Fikry Hizbullah, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Leonina K Lahama, Ludyah Annisah, Muhammad Fikry Hizbullah, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

HEAD IT DIVISION: Yudhi Astira

NETWORK: Tri Wahyudi (Hd), Rendra

SMC: Imelda, Taufik, Iqbal Maulana, Muhamad Farisi

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Najamuddin Arfah (Makasar), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu), Vina Fatma Sari (Bandung)

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin

Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P

HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana

HUBUNGAN INTERNASIONAL Fahad Thalib

SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji,

N. Subihantoro

MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza

Adittya, Ranie Anggoro

ALAMAT REDAKSI

Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta

Selatan, Indonesia Kode pos: 12810

Telp. 021 83794508 (Hunting)

Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com

iklan@aktual.com

aktual.com
 TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
 MEDIA



Mengapa TPP

Pembaca yang budiman.

Secara mengejutkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia berencana akan bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP).

Tidak tahu, mengapa Presiden mengucapkan hal itu. Padahal masih belum ada pembahasan secara komprehensif soal itu baik di tingkat legislatif atau di tingkat kementerian. Ada sesuatu yang belum terungkap disini.

Apakah benar Jokowi sudah paham dan mahfum apa hakikat dibalik TPP jika indonesia bergabung. Atau justru karena Jokowi tidak tahu apa itu binatang TPP sehingga dia mengiakan begitu saja tawaran AS tersebut.

Layak kalau banyak peneliti dan akademisi mengritisi pernyataan Jokowi tersebut. Karena mereka paham hakikat TPP justru malah merugikan kedaulatan ekonomi dan politik negara.

Di laporan utama kali ini,

Aktual mencoba untuk mengulas mengapa TPP justru merugikan negara kita.

Soal Petral, ISC dan Pertamina kembali menjadi isu penting. Ini berkaitan dengan audit Petral oleh beberapa auditor asing. Padahal BPK sebenarnya sudah mengeluarkan hasil audit tersebut.

Di rubrik hukum, soal Nasdem dan kasus Bansos yang menyeret beberapa petinggi partai itu masih menjadi topik penting. Selain itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan Gubernur nonaktif Sumut, Gatot Pujo Nugroho dan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Eddy Sofyan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hibah dana bansos. Tarik menarik antara hukum dan politik di kasus ini cukup mendapat perhatian Aktual.

Beberapa artikel lain menarik lain juga kami tampilkan dalam edisi kali ini.

Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat membaca

Redaksi

Laporan Utama

28 Skema TPP: Daulat Rakyat Hancur, Daulat Negara Porak-Poranda

Ketika bertemu Presiden Barack Obama, secara mengejutkan Presiden Jokowi isyaratkan bersedia bergabung dalam Kemitraan Lintas Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).



30 Bocoran Wikileaks Tentang TPP

Pada 2 Juli 2015 lalu, Wikileaks kembali mengungkap beberapa fakta penting mengenai beberapa draf kesepakatan rahasia antarnegara dalam skema Trade in Services Agreement (TiSA) yang dimotori oleh AS dan Uni Eropa.



34 Sepuluh Catatan Penting Buruknya TPP Bagi Indonesia

Menurut Research dan Monitoring Manager Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, sedikitnya ada 10 catatan pengalaman penting kenapa TPP akan buruk untuk Indonesia.



24 WAWANCARA

Olly Dondokambey: Relasi Agama dan Negara

Olly Dondokambey meyakini bahwa ada hubungan interaktif, mutualisme dan tak terpisah antara negara dan agama meski banyak kalangan masih banyak menilai bahwa negara dan gereja adalah entitas yang berbeda.



14 AKTUAL REVIEW

Belajar dari Kekompakan Sunni-Syiah di Kuwait

Kuwait sudah beberapa kali jadi sasaran teroris. Tetapi kekompakan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di Kuwait keduanya tidak terprovokasi untuk saling bermusuhan.

20 POLITIK

Anggaran Lobi Kunjungan Jokowi

Presiden Jokowi menggunakan jasa pelobi dalam kunjungannya ke Amerika Serikat 26-28 Oktober 2015 lalu. Nilai jasanya mencapai USD80 ribu atau sekitar Rp1,08 miliar.

36 HUKUM

Pertemuan Islah Gatot-Erri, Rio Capella Untung

Melalui Sisca dan Iwan, Rio menyampaikan pesan permintaan sesuatu kepada Evy. Yang kemudian diartikan oleh istri kedua Gatot itu sebagai imbalan uang Rp 200 juta untuk Rio.

42 EKONOMI

Jadi Poros Ekonomi Syariah Internasional, Bank Indonesia Gelar ISEF 2015

Penyelenggaraan kegiatan edukasi ini lanjut Perry merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

44 EKONOMI

Perkembangan Ekonomi dan Potensi Sulut di tengah Perlambatan Ekonomi Global

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada bulan Oktober 2015, inflasi di Manado tercatat sebesar 1,49% (month-on-month/mtm) tertinggi di Indonesia.

45 EKONOMI

Batasi Audit PETRAL, Sudirman Said Sembunyikan Banyak Fakta

"...logikanya aneh kan kalau audit forensik terhadap Petral hanya dilakukan pada 2012 sampai 2015. Ada yang ditutupi," Yusri Usman.

48 INTERNASIONAL

Menguji Nyali dan Prospek di Pasar Irak

Wartawan Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan kunjungan jurnalistik di Irak, bertepatan dengan pameran perdagangan internasional di Baghdad, 1-10 November 2015. Berikut laporannya tentang upaya pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke pasar, di negara yang "rawan dan berbahaya" tersebut.

53 RESENSI

Di Bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial

Penulis buku ini membawa pembaca pada situasi dan pemahaman perubahan politik tiga negara di akhir abad ke 19. Spanyol sebagai simbol kekuatan kolonial tertua saat itu tengah sakit keras.

3	Tatap Redaksi	22	Kilas Nasional	46	Kilas Ekonomi
5	Terkini	26	Kilas Politik	52	Life
8	Kaki Hari	40	Kilas Hukum	54	Oase

Wah! Era ISC Sudirman Said - Daniel Purba, Pernah Capai Rekor Harga Impor Minyak Tertinggi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2012, 2013, dan 2014 (Semester I) pada PT Pertamina (Persero) dan Petral/PES dengan predikat "Wajar". Hasil Audit Lembaga Independen Asing asal Australia, Kordamentha yang ditunjuk Pertamina seperti yang disampaikan Dirut Pertamina menyebutkan tidak ada kerugian negara dari hasil audit rentang waktu 2012-2014. Lantas kenapa Menteri ESDM ngotot untuk mengatakan ada kerugian negara sampai USD18 miliar (sekitar Rp250 triliun) dari kegiatan bisnis Petral-PES selama rentang tahun tersebut?

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa bahwa laporan audit forensik ini dapat menjadi pintu masuk untuk audit dan investigasi yang lebih luas untuk mendapatkan gambaran besaran kerugian Pertamina dan negara dari pengadaan minyak yang dilakukan oleh Petral-PES. Selain itu akan ditemukan pihak-pihak pembuat keputusan/kebijakan pengadaan minyak dari pihak pemerintah dan internal Pertamina yang terlibat dalam menyebabkan kerugian tersebut.

"Saya mendesak Presiden untuk memerintahkan BPK RI melakukan investigasi untuk memperkuat bukti-bukti pelanggaran hukum dan kerugian negara. Buat tim investigasi gabungan dengan supervisi KPK jadi para aktor yang terlibat terungkap tuntas," ujar dia saat dihubungi, Kamis (12/11).

Senada dengan Fabby, Anggota DPR Komisi VII, Kurtubi saat dihubungi Kamis (12/11) menambahkan bahwa audit Petral periode 2012-2014 bisa menjadi penggalan *sample* yang diasumsikan mewakili populasi periode waktu yang lebih panjang ke belakang, mengingat Mafia Migas mungkin pemain-pemain berikut *backing*-nya, itu juga orangnya. "Yang penting, kita lihat *follow up* dari hasil-hasil audit

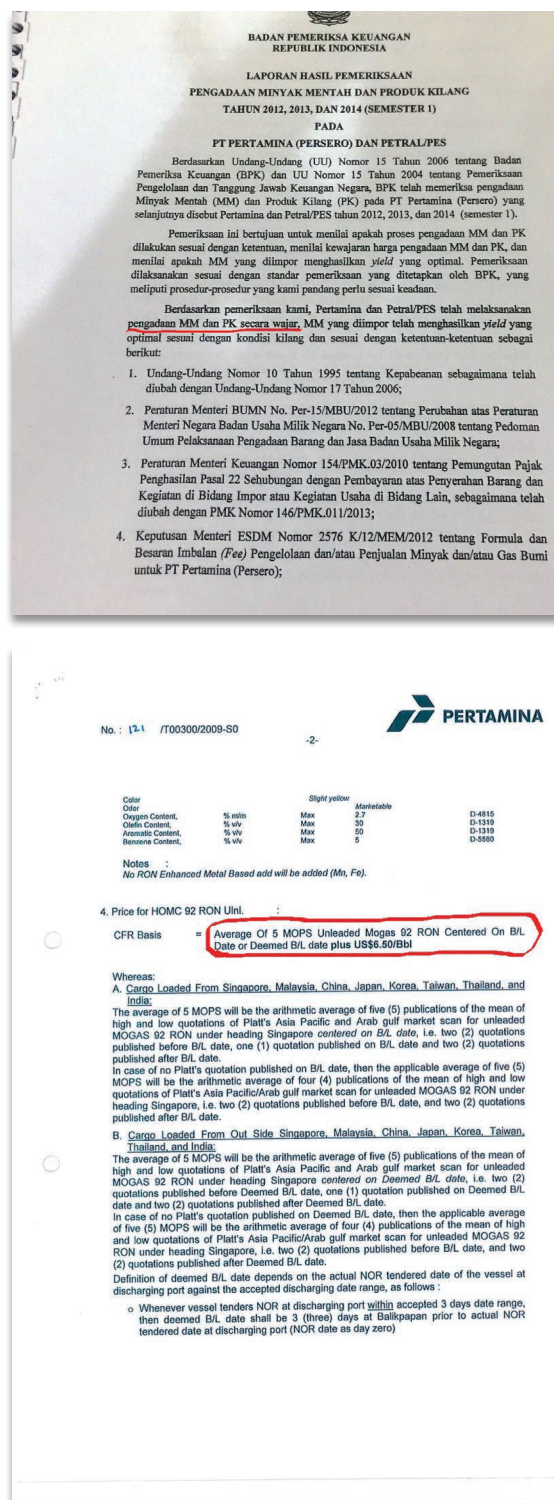
tersebut. Kalau dibawa ke ranah hukum, mungkin aktor selama belasan tahun terakhir akan bisa terkuak juga. Yang penting hasil audit forensik ini kita dorong untuk dibawa ke ranah hukum."

Sebagai informasi berdasarkan data yang diperoleh, diketahui Sudirman Said sewaktu menjabat SVP Integrated Supply Chain (ISC), pada tahun 2009 dalam beberapa pengadaan (Minyak Mentah dan BBM) Sudirman melakukan inefisiensi bahkan cenderung *markup* dan merugikan Pertamina. Sudirman melakukan pembelian (Minyak Mentah dan BBM) dengan harga alfa (diluar MOPS) tertinggi hingga US\$6,50/barel. Padahal pembelian sebelumnya tidak pernah mencapai angka setinggi itu (rata-rata US\$3/barel). Sampai akhirnya ISC era Sudirman Said dilikuidasi (Maret 2009), dan harga alfa (dilluar MOPS) kembali ke angka kisaran US\$3/barel.

Hal ini diketahui dalam beberapa Purchasing Order (PO) nomor 121/TOO300/2009-SO, tanggal 21 Januari 2009, Nilai alfa (diluar MOPS) US\$6,50/barel, No PO 116/TOO300/2009-SO, nilai alfa (diluar MOPS) US\$5,70/barel tertanggal 20 Januari 2009 dan PO 113/TOO300/2009-SO tertanggal 20 Januari 2009, seharga alfa (Diluar MOPS) US\$5,95/barel. Semua dokumen tersebut ditandatangani oleh VP Procurement, Sales dan Market Analysis, Daniel Purba. Saat ini Daniel Purba pun menjabat sebagai VP ISC Pertamina.

Menurut Direktur Lingkaran Studi Strategis, Iqbal Nusantara saat dihubungi Kamis (12/11) jika data yang beredar itu benar, maka audit forensik Petral bisa menyeret Sudirman Said dan Daniel Purba sebagai Mafia Migas. Jokowi harus segera membersihkan kabinetnya dari pelaku yang terlibat merugikan negara.

"Jika data ini benar, maka hasil



audit Petral bisa menggiring Sudirman Said dan Daniel Purba sebagai Mafia Migas. Sebaiknya Sudirman Said dicopot," tegasnya. /Ismed Eka



Rupiah stabil dan berdaulat adalah harapan kita semua. Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan.

Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan terhadap dolar AS lebih tinggi, secara alamiah dolar AS akan menguat. Kalau kita ingin menjadikan Rupiah lebih stabil dan menguat, jawaban sebenarnya sederhana, yaitu kurangi permintaan dolar, tingkatkan permintaan atau penggunaan Rupiah.

Namun masalahnya, tentu tak sesederhana itu. Sejak 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dolar AS, daripada pasokannya. Tingginya permintaan Dolar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Kondisi ekonomi global saat ini juga memberi pengaruh. Rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, telah mengakibatkan dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah.

Di sisi lain, tahun 2005, utang luar negeri atau korporasi atau swasta berjumlah sekitar 80 miliar dolar AS. Di tahun 2015,

jumlahnya meningkat hingga mencapai sekitar 160 miliar dolar AS. Selain itu, rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah Debt Service Ratio (DSR), juga meningkat dari sekitar 15 persen di tahun 2007 menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015.

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menempuh beberapa kebijakan, antara lain, upaya pendalaman pasar keuangan, agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi. Bank Indonesia juga melakukan monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 16/20/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri yang mencakup tiga hal, yakni rasio lindung nilai, rasio likuiditas dan peringkat utang.

Simbol kedaulatan

Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi, kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan Rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

KEDAULATAN RUPIAH MEMPERSATUKAN 34 PROVINSI DI INDONESIA



Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia jumlahnya cukup tinggi. Bayangkan, angkanya mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp78 triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp936 triliun per tahun.

Tingginya transaksi dalam dolar tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur hingga perdagangan.

Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun dapat dilihat sebagai bentuk 'ancaman' atau *soft invasion* terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu Negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia dan Pasifik, membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya akan memperlemah perekonomian nasional dan menimbulkan ketidakpastian. Kita juga pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena Rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan tersebut, masyarakat perlu mendukung penggunaan mata uang Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011, dan selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.

Menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap Rupiah ditentukan oleh banyak hal. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi defisit ekspor-impor barang dan jasa, tidak dapat ditawar lagi.

Namun, di sisi lain, upaya menjadikan Rupiah berdaulat di negeri sendiri juga mutlak perlu didukung. Mata Uang Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.





Demokrasi Berkebudayaan dan Budaya Berdemokrasi

Perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan-patahan lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan. Politik sebagai teknik mengalami kemajuan, tetapi politik sebagai etik dan estetika mengalami kemunduran. Perkembangan demokrasi sebagai prosedur mengalami perubahan cepat dan massif, tapi demokrasi sebagai substansi seakan jalan ditempat.

Politik sebagai dimensi manusia secara keseluruhan memerlukan tautan harmonis antara individu dan masyarakat (mikro-kosmos dan makro-kosmos). Untuk pertautan itu, jembatan penghubungnya adalah etika dan estetika. Etika dan estetika membantu manusia untuk menentukan pilihan yang tepat dalam perkembangan abadi menuju kebaikan, kebenaran, keadilan, dan keindahan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, politik yang baik dengan sendirinya harus merupakan politik yang berkebudayaan.

Setelah lima belas tahun gerakan reformasi digulirkan, pelbagai langkah untuk mendemokratisasikan institusi dan prosedur-prosedur politik Indonesia telah dilakukan dengan sejumlah transformasi yang nyata: pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif bebas dan berkala (meski di sana sini masih ada masalah menyangkut asas *fairness*), kebebasan berkumpul dan berekspresi, keluasaan akses informasi, desentralisasi dan

otonomisasi, pemilihan presiden dan pilkada secara lebih kompetitif.

Dalam hal upaya mewujudkan substansi demokrasi, pada kenyataannya terkendala oleh hambatan-hambatan kultural, institusional dan struktural. Pada tingkat kultural, selama era reformasi, politik sebagai teknik mengalami kemajuan; tetapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Perangkat keras--prosedur demokrasinya terlihat relatif lebih demokratis; namun perangkat lunak--budaya demokrasiya masih tetap nepotis-feodalistis; pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritokrasi (pemerintahan orang-orang berprestasi), malahan sebaliknya cenderung diikuti mediokrasi (pemerintahan orang sedang-sedang saja).

Singkat kata, lima belas tahun Orde Reformasi, demokrasi Indonesia masih menyimpan banyak persoalan, yang jika tidak diatasi secara segera bisa menimbulkan keraguan umum mengenai kebaikan demokrasi.

Solusi atas kelemahan demokrasi tidak ditempuh dengan jalan menguranginya, melainkan justru dengan jalan menambahnya agar lebih demokratis. Karena itu, perlu ada pendalaman dan perluasan demokrasi. Pendalaman demokrasi diarahkan untuk menyempurnakan institusi-institusi demokrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan kepatutan etis, lebih responsif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat; mengurangi sifat narsisme politik yang hanya melayani segelintir elit politik. Sementara perluasan demokrasi diarahkan agar

institusi demokrasi dan kebijakan politik punya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang dapat melumpuhkan demokrasi.

Secara singkat dapat dikatakan, ada dua tantangan besar dalam usaha untuk melakukan pendalaman dan perluasan demokrasi. Pertama, tantangan untuk mengembangkan demokrasi yang berkebudayaan. Kedua, tantangan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang kondusif bagi pengembangan demokrasi.

Demokrasi yang sehat harus mengandung cita-cita kebudayaan; bahwa demokrasi bukan sekadar alat teknis belaka, tetapi juga suatu ekspresi pikiran, perasaan, dan kepercayaan sesuai dengan kepribadian dan cita-cita kekeluargaan-keadilan kebangsaan Indonesia; dengan cara mempertahankan nilai-nilai lama yang baik seraya mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik.

Cita-cita kedaulatan rakyat (demokrasi) memiliki jangkar yang kuat dalam sejarah politik Indonesia. Stimulusnya bersumber dari tradisi musyawarah desa; semangat kesederajatan, persaudaraan dan permusyawaratan Islam; dan gagasan emansipasi dan sosial-demokrasi Barat. Semangatnya dikobarkan oleh kehendak untuk membebaskan diri dari represi politik dan ekonomi kolonialisme-kapitalisme serta tekanan tradisi feodalisme.

Dengan mempertimbangkan tradisi gotong-royong masyarakat Indonesia, watak multikultural kebangsaan Indonesia, dan pengalaman keterjajahan sebagai perpanjangan dari kapitalisme dan individualisme, para pendiri bangsa menggagas demokrasi yang sejalan dengan alam pikiran dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Yakni suatu demokrasi permusyawaratan yang menyediakan wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan

dan keadilan sosial di bawah bimbingan hikmah-kebijaksanaan.

Di bawah semangat kekeluargaan, negara yang berkedaulatan rakyat itu mengadakan cita-cita kerakyatan dan permusyawaratan. Dalam visi negara ini, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka 'musyawarah-mufakat'. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh diktator mayoritas (mayorokrasi) atau tirani minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warganegara tanpa pandang bulu.

Di bawah orientasi etis hikmah-kebijaksanaan, demokrasi direalisasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; serta nilai-nilai persatuan (kekeluargaan) dan keadilan. Demokrasi yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan para penyelenggara negara untuk memelihara budipekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Demokrasi yang berdasarkan nilai persatuan dan keadilan, dituntut untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Orientasi etis "hikmah-kebijaksanaan" juga mensyaratkan adanya wawasan pengetahuan yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah mereka yang

mewakili rakyat bisa merasakan, menyelami dan mengetahui apa yang dipikirkan rakyat untuk kemudian diambil keputusan yang bijaksana yang membawa republik ini pada keadaan yang lebih baik. Orientasi etis "hikmah-kebijaksanaan" juga menyaratkan kearifan untuk dapat menerima perbedaan secara positif dengan memuliakan apa yang disebut sebagai "kebajikan keberadaban" (the virtue of civility); yakni rasa pertautan dan kemitraan di antara ragam perbedaan dan kesediaan untuk berbagi substansi bersama, melampaui kepentingan kelompok, untuk kemudian melunakkan dan menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil.

Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat, tanpa pandang bulu, harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya; bukan dengan kepentingan kelompoknya. Dengan bimbingan hikmah-kebijaksanaan, perilaku politik yang etis akan berkembang. Di lembaga perwakilan, wakil-wakil rakyat berdebat, bersikukuh dengan kebenaran pendapatnya namun dengan menjunjung etika politik dan semangat kekeluargaan. Rakyat pun akan melihat apa yang dilakukan wakil-wakilnya itu memang merepresentasikan kedaulatan rakyat, bukan memperlak rakyat untuk mencapai tujuannya. Dengan dimulainya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warganegara yang bijaksana, dengan kekuatan daya pikir yang dapat memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya.

Singkat kata, demokrasi berkebudayaan dan budaya berdemokrasi harus terus diperkuat agar demokrasi bisa diperdalam dan diperluas demi penyehatan institusi demokrasi dan pencapaian kesejahteraan rakyat. ◦



LENSA AKTUAL

70 Tahun Histori Masa Depan

Sejumlah pejuang Indonesia berusaha melawan prajurit Inggris saat aksi teatrikal yang ditampilkan saat pembukaan pameran foto dan peluncuran buku 70 tahun Indonesia "Histori Masa Depan" di Galeri House Of Sampoerna, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/11). Pameran tersebut menampilkan sejumlah foto perjuangan pada periode mempertahankan kemerdekaan antara 1945 hingga 1950 sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pahlawan.

Antara Foto - Zabur Karuru





Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga melakukan penekanan palm handscren menandai Pembukaan Perdagangan Saham Telkom didampingi Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida (kiri) dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis & Media Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno (kanan) serta Jajaran Komisaris dan Direksi Telkom Group di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/11)

20 TAHUN DI LANTAI BURSA

Tanggal 14 November 1995 merupakan momen bersejarah bagi Telkom, sebagai hari dimana Telkom melakukan penawaran saham perdana ke publik (Initial Public Offering/IPO) tidak hanya di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga di New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE).

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) melakukan seremoni pembukaan perdagangan saham pada Senin, 2 November 2015 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pembukaan perdagangan itu dilakukan memperingati 20 tahun kiprah Telkom di lantai bursa. Dua puluh tahun lalu, tepatnya 14 November 1995

Telkom menorehkan sejarah dengan melakukan penawaran saham perdana ke publik (Initial Public Offering/IPO) tidak hanya di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga di Bursa Efek New York atau New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). Saat ini bahkan Telkom menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang dual listing

di BEI dan NYSE.

“Bagi Bangsa Indonesia, kehadiran sebuah perusahaan nasional di NYSE atau Wall Street merupakan kebanggaan tersendiri. Sebagai perusahaan milik negara, diperdagangkannya saham Telkom di bursa global tentulah memiliki nilai strategis, disamping meningkatkan

kebanggaan nasional,” demikian Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga.

Meningkatkan Transparansi

Listing di berbagai bursa saham dunia telah memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan-perusahaan Indonesia. Sementara secara internal kehadiran Telkom di bursa saham mampu meningkatkan transparansi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Dua listing memang dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan memberikan kemudahan mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pendanaan eksternal di tingkat internasional. Dengan dual listing, Telkom juga dituntut untuk menunjukkan performansi perusahaan yang terus meningkat guna memenuhi harapan seluruh para pemegang saham dan investor.

Kepala Eksekutif Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan, “Kita bisa lihat bahwa Telkom dapat tumbuh dengan baik setelah Go Public di Bursa Efek Indonesia dengan mengoptimalkan semua manfaat yang dapat diperoleh dari pasar modal,” ungkapny.

“Kita berharap akan semakin banyak perusahaan nasional yang melakukan dual listing, mengingat manfaatnya cukup signifikan bagi pertumbuhan perusahaan,” ujar Alex.

Kehadiran Telkom berkiprah selama 20 tahun di bursa saham merupakan keputusan yang tepat. Eksistensi operator merah putih ini pun semakin teruji dalam berkiprah di bursa utama dunia dan terbukti memperlihatkan kinerja yang baik. Tak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, melainkan juga bagi para pemegang saham dan negara.

The King of Digital

Setelah dua puluh tahun kehadiran Telkom di bursa yang memang memiliki makna penting baik bagi Telkom sendiri maupun dunia bisnis di Indonesia pada umumnya,

saat ini Telkom menjadi operator telekomunikasi terdepan dengan selalu mencatat pertumbuhan positif. Bila dibandingkan harga saham saat IPO 20 tahun yang lalu, dapat dikatakan saham Telkom hingga tahun 2015 ini telah mengalami peningkatan sekitar 1400%.

Guna menjaga pertumbuhannya, Telkom menetapkan tiga program utama sebagai mesin pertumbuhan. Yakni Mobile Business dengan tetap mempertahankan pertumbuhan double digit; Indonesia Digital Network dengan mendorong bisnis digital; serta International Expansion.

Melalui tiga fokus utama tersebut, Telkom bertekad menjadi The King of Digital. Menjadi Raja di udara melalui selular bisnis, Telkomsel; Raja di darat melalui fiber to the home (FTTH) yang lebih dikenal sebagai Indihome, dan menjadi raja di laut melalui submarine broadband highway dari Aceh sampai Papua serta ekspansi internasional, dimana Telkom sekarang telah memiliki footprint di 10 negara, yakni Singapore, Hong Kong, Macau, Timor Leste, Australia, Myanmar, Malaysia, Makau, Taiwan, Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Tidak hanya memiliki infrastruktur yang menghubungkan seluruh Nusantara, Telkom juga siap mewujudkan “Indonesia Global Networks” dengan ikut membangun sistem komunikasi kabel laut yang menghubungkan Indonesia ke negara-negara diarah Barat Indonesia hingga Eropa melalui Konsorsium South East Asia – Middle East -Western Europe 5 (SEA-ME-WE 5).

Sedangkan untuk ke arah Timur Indonesia, Telkom bergabung bersama operator kelas dunia lainnya dalam Konsorsium South East Asia – United States (SEA-US). Selanjutnya Telkom juga sedang membangun jaringan kabel laut Dumai-Manado yang diberi nama “Indonesia Global Gateway” guna menghubungkan SEA-ME-WE 5 dengan SEA-US. Ketiga infrastruktur besar kabel laut berskala dunia tersebut melengkapi infrastruktur internasional yang telah dimiliki.



(Kanan-Kiri) Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga memperhatikan pergerakan saham Telkom pada Pembukaan Perdagangan Saham Telkom bersama Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis & Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/11).

Belajar dari Kekompakan Sunni-Syiah di Kuwait

Kalau di Indonesia saat ini terkesan sedang dikipas-kipas konflik antara Sunni versus Syiah, di Kuwait—negara monarki Arab Teluk—baru-baru justru muncul berita yang menarik dan kontras. Menteri Pengadilan, Wakaf dan Urusan Islam Kuwait Yaqoub Al-Sanea ketika diwawancarai DPA Jerman, sebagaimana dilansir Alwaie News (6 November 2015) justru menegaskan persatuan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di negeri kaya minyak ini.

“Peristiwa-peristiwa teror yang terjadi di Kuwait sama sekali tidak bisa mengusik dan memusnahkan persatuan antara warga Sunni dan warga Syiah Kuwait... Kuwait adalah negara yang berlandaskan hukum dan tidak terpengaruh oleh sektarianisme. Sudah 300 tahun warga Sunni dan Syiah di negara hidup berdampingan dengan rukun, bersaudara dan setara,” kata Yaqoub Al-Sanea.

Kuwait sudah beberapa kali jadi sasaran serangan teroris. Yang jadi target terutama adalah masjid-masjid komunitas Muslim Syiah. Masjid Imam Jakfar al-Shadiq diserang pada 26 Juni 2015, saat warga Muslim Syiah sedang melaksanakan sholat Jumat. Akibatnya, 27 jamaah meninggal dan 227 lainnya luka-luka.

Tetapi—dan ini hebatnya kekompakan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di Kuwait—keduanya tidak terprovokasi untuk saling bermusuhan. Sebaliknya, ribuan warga Muslim dari kedua mazhab besar Islam ini pada Jumat berikutnya justru bergabung. Mereka menyelenggarakan sholat Jumat bersama di Masjid Agung Kuwait.

Untuk lebih memperlihatkan persatuan Sunni dan Syiah,

diselenggarakan majelis khitam (tahlil) untuk para korban tragedi ini (warga Syiah) di Masjid Agung al-Kabir milik warga Sunni. Dengan cara ini, otoritas Kuwait ingin menyampaikan pesan bahwa persatuan Sunni-Syiah tidak dapat digoyahkan oleh siapa pun.

Sebagai tindak lanjut dan respons terhadap provokasi terus-menerus, yang ingin membenturkan komunitas Sunni dan Syiah, pemerintah Kuwait sudah mencanangkan suatu pola baru serta program-program keagamaan, yang bertujuan memasyarakatkan paham moderat dan membendung radikalisme di semua masjid dan pusat keagamaan di Kuwait.

Umat Islam Indonesia bisa belajar banyak dari Muslim di Kuwait. Perdamaian dan kerukunan antar umat beragama itu sangat bernilai dan mahal harganya. Banyak orang lebih mengedepankan emosi dan akal pendek, mendahulukan versi kebenarannya sendiri dengan menafikan hak-hak orang lain, karena mereka tidak pernah merasakan pahit getirnya perang dan konflik berdarah yang berkepanjangan. Maka mereka begitu bersemangat menghantam sana-sini, menindas pihak-pihak yang dianggap tidak sesuai dengan versi kebenaran yang dianutnya.

Mereka yang sudah mengalami pahit getir konflik berdarah-darah, biasanya lebih mudah memahami perdamaian. Karena sadar, di atas tanah yang sama, ruang-waktu yang sama, kita tidak mungkin hidup nyaman dengan permusuhan, kebencian, dan penuh kecurigaan di antara sesama manusia. Karena sama-sama menyadari hal itu, tanpa menafikan perbedaan yang ada (yang memang tidak bisa dengan gampang dianggap sama saja)

mereka mencari formula untuk hidup bersama.

Setiap negara dan bangsa mencoba resep yang berbeda-beda, tergantung situasi, kondisi lingkungannya. Lebanon yang sudah trauma perang saudara, misalnya, membuat kesepakatan dalam urusan kenegaraan. Yakni, jabatan Presiden itu jatah Kristen. Perdana Menteri jatah Muslim Sunni. Ketua Parlemen jatah Muslim Syiah.

Di Indonesia, karena jumlah Muslim yang mayoritas mutlak, kita tidak membuat pengaturan semacam ini, tetapi membuat rumusan Pancasila. Semua orang apa pun latar belakang agama dan etnisnya bisa menjabat apa saja sesuai kemampuannya. Lalu ada pertanyaan, apakah orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu bisa menjadi Presiden RI atau Wapres RI? Jawabannya: Secara konstitusional tidak ada larangan buat mereka menjadi Presiden atau Wapres. Jadi sah dan boleh saja.

Tetapi jika mereka maju dan kemudian tidak terpilih, atau tidak didukung secara demokratis, itu adalah yang kita sebut realitas politik. Itu sah saja. Mereka tidak terpilih bukan karena dibatasi oleh konstitusi, tetapi kalah dalam meraih dukungan suara. Hal ini berlaku untuk jabatan lain yang melalui pemilihan juga, misalnya, jabatan Gubernur.

Umat Islam Indonesia sudah dikenal di dunia sebagai umat yang mengedepankan sikap moderat dan toleran. Jangan biarkan citra positif ini dirusak oleh orang-orang yang kerjanya mengipas-ngipas dan membakar konflik antar umat beragama. Provokasi semacam itu harus dilawan, karena taruhannya terlalu tinggi, yakni keselamatan bangsa ini. ● Satrio Arismunandar





Pulau Sumba, The Iconic Island of Renewable Energy

Hasil Studi oleh Hivos bersama Winrock pada 2010, Pulau Sumba direkomendasikan sebagai The Iconic Island of Renewable Energy. Selanjutnya, pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan merupakan suatu kegiatan yang telah diinisiasi sejak tahun 2010 oleh Kementerian ESDM, Bappenas dan Hivos. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses energi yang dapat diandalkan kepada masyarakat yang tinggal di pulau berukuran kecil dan sedang di Indonesia, melalui pengusahaan energi terbarukan, dengan target terwujudnya ketersediaan energi yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan sebesar 100% pada tahun 2025.

Sebagai landasan hukum penetapan pulau sumba sebagai The Iconic Island of Renewable

Energy adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3051K/30/MEM/2015 tanggal 1 Juni 2015 Tentang Penetapan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Selain itu, juga ada surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 556K/73/DJE/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Tim Implementasi Iconic Island Tahun Anggaran 2015. Program Sumba sebagai pulau Ikonis Energi Terbarukan ini juga melibatkan stakeholder dan instansi dari dalam dan luar negeri antara lain HIVOS, Asian Development Bank(ADB), WhyPGen, World Bank, BPPT, PT. PLN, KPDT, KemenUKM dan Koperasi, KemLHK, Pertamina, BNI46, IBEKA dan berbagai LSM setempat dengan perannya masing-masing sesuai road

map yang telah disepakati.

Program Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan Di Sumba

Energi terbarukan (ET) di pulau Sumba berasal dari air, angin, matahari, biogas, dan biomassa. Potensi ET dari tenaga hydro mencapai 15 MW, angin 168 MW dan tenaga surya 5 kWh/m²/hari. Capaian pengembangan Energi Terbarukan di Pulau Sumba antara lain Pertama, total kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis ET di Pulau Sumba dari tahun 2011 sampai 2014 mencapai 5,87 MW yang terdiri dari instalasi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikrohidro, PLTSolar(PLTS), solar water pumping, PLTBayu (PLTB), PLT Bioenergi (PLTBg/ biomassa), biogas, tungku hemat energi dan jaringan distribusi.

Kedua, sampai dengan tahun

Instalasi	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Akumulasi Realisasi
PLTM H (mikro hidro, mini hidro)	2 Unit (52 KW)	3 Unit (1.632 KW)	3 Unit (1.632 KW)	2 Unit (232 KW)	1 Unit (23 KW)	13 Unit (3.444 KW)
PLTS Terpusat	11 Unit (43 kWp)	8 Unit (45 kWp)	8 Unit (45 kWp)	6 Unit (216,9 kWp)	N/A	39 Unit (911,9 kWp)
PLTS Tersebar	90 Unit (3,1 kWp)	3.221 Unit (87,79 kWp)	3.221 Unit (87,79 kWp)	464 Unit (19,35 kWp)	N/A	14.829 Unit (439,1 kWp)
Solar Water Pumping	N/A	1 Unit (1,44 kWp)	1 Unit (1,44 kWp)	N/A	N/A	3 Unit (6,6 kWp)
PLTB ayu (non-komersil, skala rumah tangga)	N/A	95 Unit (47,5 kW)	95 Unit (47,5 kW)	5 Unit (2,5 kW)		100 Unit (50 kW)
Bio massa	N/A	1 Unit (30kW)	1 Unit (30 kW)	N/A	1 Unit (1.000 kW)	2 Unit (1.030 kW)
Biogas	61 Unit (360 m3)	526 Unit (4.088 m3)	526 Unit (4.088 m3)	220 Unit (1.412 m3)	N/A	1.173 unit (7.946 m3)
Tungku Hemat Energi	N/A	375 Unit	375 Unit	125 Unit	N/A	2.100 Unit
PJU Cerdas Tenaga Surya	N/A	N/A	N/A	N/A	480 Unit	480 Unit

2014, Ditjen EBTKE telah melakukan pembangunan infrastruktur ET, yaitu 1 unit PLT mikrohidro dengan kapasitas 32 KW, 6 unit PLTS terpusat, 464 unit PLTS tersebar, 5 unit PLTB, 1 unit PLTBg kapasitas 30 KW, 220 unit digester biogas, serta 2.200 unit tungku hemat energi yang diserahkan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2015, Kementerian ESDM telah melakukan pembangunan infrastruktur ET di Pulau Sumba dari dana APBN 2015 dengan total anggaran sebesar Rp. 114.986.500.000,- untuk mempercepat implementasi Program Sumba Iconic Island, diantaranya Pembangunan PLTBg-Biomasa kapasitas 1 MW yang berlokasi di Sumba Barat, Program Pengembangan Hutan Energi 1 juta pohon kaliandra, lahan yang disediakan sekitar 100 Ha di Sumba Barat, Revitalisasi digester biogas 85 unit di Sumba Barat Daya, Implementasi Mobil listrik di Sumba Timur, PLTMH kapasitas 23 KW di Sumba Timur, PLTB di Sumba Barat, dan Penerangan Jalan Umum (PJU) cerdas di Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah.

Menteri ESDM beserta Dubes Norwegia juga telah melakukan kunjungan ke Pulau Sumba dalam rangka meninjau implementasi Program Sumba Iconic Island (SII), sekaligus meresmikan PLTMH La

Au di Kamanggih, Sumba Timur. Arahkan Menteri ESDM agar penyediaan energi yang berbasis energi terbarukan sebesar 100% dan rasio elektrifikasi 95% dapat dicapai dengan lebih cepat pada 2020, dari sebelumnya ditargetkan pada 2025.

Program BIRU sebagai bagian dari Sumba Iconic Island

Program BIRU (Biogas Rumah, atau Indonesia Domestic Biogas Programme) adalah program yang dimulai dari kerjasama Kementerian ESDM dari pihak pemerintah Indonesia dan Belanda pada tahun 2009, diimplementasikan oleh Hivos dengan dukungan teknis dari SNV, dan keduanya merupakan lembaga swadaya masyarakat dari Belanda. Program BIRU bertujuan untuk mengembangkan sektor biogas domestik di Indonesia, dengan menyediakan akses energi bersih dan terbarukan melalui pemanfaatan biogas skala rumah tangga, bagi peternak di Indonesia.

Program BIRU merupakan program dengan multi-manfaat baik dari sisi lingkungan, pertanian, pemakaian bahan bakar konvensional dan perekonomian masyarakat. Pada tingkat nasional, pemanfaatan biogas juga berdampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Manfaat lain dari program BIRU adalah adanya kemandirian di masyarakat dalam mengelola limbah menjadi sumber

daya energi yang lebih berkelanjutan.

Pada saat dimulai di tahun 2009, Program BIRU bekerja di empat provinsi di Pulau Jawa: Jawa Barat, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Setelah itu berturut-turut program Biru diperluas ke provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba dan Banten, atau total 10 provinsi dan 107 kabupaten/kota. Saat ini, instalasi biogas skala rumah tangga yang sudah dibangun melalui Program BIRU di Pulau Sumba mencapai 395 unit.

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas program, BIRU akan melakukan serangkaian peningkatan infrastruktur program; mulai dari peningkatan sumberdaya manusia, perbaikan sistem database yang lebih inklusif, melakukan piloting perhitungan emisi karbon dari pemanfaatan bio-slurry dan bekerja sama lebih menyeluruh dengan kelompok perempuan pebisnis skala kecil-menengah.

Rencana Pengembangan Sumba Iconic Island

Dalam rencana pengembangan kegiatan infrastruktur ET pada tahun 2016, Kementerian ESDM akan membangun 3 PLTS di Sumba Timur dengan kapasitas terpasang masing-masing yaitu di Desa Watumbelar 21kWp, Desa Pundu Harani 40 kWp dan desa Kuruwaki 30 kWp.

Harga Air di Jakarta Selangit

Harga jual air yang ditetapkan oleh perusahaan air minum (PAM) Jaya, ternyata sangat mahal dan mencekik leher rakyat. Pasalnya setiap air yang dijual sebanyak M3, akan dipatok rata-rata tarif sebesar Rp7.794 per M3.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, tarif penjualan tersebut terlalu tinggi untuk masyarakat, terlebih masih banyak rakyat yang belum mendapat akses air dari PAM Jaya ini.

“Rata rata tarif penjualan ini, betul betul harga selangit, dan masih banyak rakyat yang belum mendapat akses air dari PAM Jaya,” kata Uchok saat berbincang dengan aktual.com di Jakarta, Jumat (6/11).

Dibeberkan Uchok, menurut hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan provinsi DKI Jakarta, atas evaluasi kinerja perusahaan daerah air minum provinsi DKI Jakarta untuk tahun buku 2014, dengan rata rata tarif penjualan air sebesar Rp5.118 per M3, PAM Jaya sudah untung sangat besar.

“Dari keuntungan itu saja bisa menutupi pengeluaran beban produksi, sehingga tidak perlu mematok harga tinggi,” tutupnya.

/Zaenal Arifin-Muhammad Kemal Macharani



Tak Mampu Beli Sepatu, Veteran Ini Hadiri Upacara Hari Pahlawan Gunakan Sandal Jepit

Di Hari Pahlawan 10 November 2015, sebanyak 18 veteran di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, belum mendapat kesejahteraan yang layak dari pemerintah.

Perlakuan ini tidak sebanding dengan jasa veteran tersebut ketika memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Salah satu veteran, Khariri (86), yang datang ke kawasan Hotel Horison Pekalongan, Jateng untuk memperingati Hari Pahlawan,

datang dengan menggunakan sandal jepit, lantaran tidak mampu untuk membeli sepatu.

“Tak punya sepatu. Cuma sandal saja. Habis tidak punya uang,” terang dia disela-sela acara sarasehan Hari Pahlawan di hotel Horison, Selasa (10/11).

Khariri adalah veteran pejuang Batang-Pekalongan yang berjuang dalam pembebasan tentara di Mangkang Semarang.

Ia mengaku, apresiasi dan penghargaan yang diberikan

Yusril Nilai Ahok Gagal Kelola Sampah Jakarta

Kisruh sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, semakin memanas. Bahkan, persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum.

Pakar Hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, yang bertindak selaku kuasa hukum PT Godang Jaya Tua Jo dan PT Navigat Organic Energy Indonesia, selaku pengelola Tempat pembuangan sampah terakhir (TPSP) Bantar Gebang, Bekasi, menyatakan bahwa, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), telah gagal mengelola persoalan sampah di Ibu Kota.

“Yang jelas, ini kegagalan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) dalam pengelolaan sampah,” katanya di kantornya, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/11).

Mantan Menteri Sekretaris Negara itu melanjutkan pengelolaan sampah adalah salah satu tolak ukur keberhasilan Ahok dalam menata dan mengelola ibu kota. Namun sayang hingga kini DKI Jakarta belum memiliki tempat pembuangan sampah sendiri.

“Jadi, sampah-sampah dari Jakarta ditampung di Bantar Gebang,” katanya.

Yusril mengungkapkan,

pemerintah kepadanya, hanya berupa dana tunjangan sebesar Rp1,75 juta dan dana penghormatan sebesar Rp750 ribu.

Kini, Khariri ikut tinggal bersama anak ketiga dan kelima di desa Depok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pekalongan, Jateng.

Diceritakan Khariri, dirinya harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ketika dirinya menjadi pejuang di wilayah Batur, Wonosobo dan kembali ke Bandar.

Pria yang memiliki lima anak dan lima cucu itu, mengaku tidak mempersoalkan kesejahteraan yang diberikan pemerintah.



sebenarnya Pemprov DKI sudah membuat master plan pengelolaan sampah di Jakarta.

Ada beberapa lokasi yang akan dijadikan tempat pembuangan sampah, misalnya di kawasan Marunda, Jakarta Utara dan Cakung, Jakarta Timur. Namun demikian hingga kini wacana tersebut tidak pernah direalisasikan.

“Ini artinya apa? Pemerintah DKI Jakarta tidak berhasil kelola sampah. Pemerintah DKI Jakarta harus sadar bahwa ia sudah lalai,” demikian Yusril.

Seperti diketahui, masyarakat Cileungsi, Bogor, menghadang mobil-mobil truk pengangkut sampah dari Jakarta, untuk dibuang di Bantar Gebang.

Hal ini karena dinilai masyarakat, sangat mengganggu kenyamanan mereka, seperti terjadinya bau tak sedap, pencemaran udara dan tanah.

/Zaenal Arifin-Ant

Namun, dirinya cukup bangga jika kemerdekaan Indonesia bisa dirasakan oleh anak dan cucunya.

Sementara, Mahmudin, salah satu anggota TNI-AD, minta agar Pemda betul-betul memperhatikan kesejahteraan pejuang veteran.

“Kesejahteraan yang diberikan oleh negara kepadanya kurang layak. Apresiasi dan penghormatan kepada veteran masih kecil,” beber dia.

Ia mengatakan apresiasi Pemda kepada belasan para pejuang veteran hanya berupa paket sembako yang nilainya tak pantas. Bantuan itu diberikan hanya setahun sekali pada tanggal 10 Agustus. /Zaenal Arifin-Muhammad Dasuki

Hollande Putuskan Negara Dalam Keadaan Darurat

Sekelompok orang tak dikenal yang menggunakan senjata organik militer jenis AK 47 dan bahan peledak melakukan aksi penyanderaan terhadap lebih dari 100 orang di Gedung Teater Bataclan di pusat kota Paris, Perancis.

Menurut pernyataan kepolisian Perancis, seperti dilansir Reuter (14/11) ketika polisi melakukan penyergapan lebih dari 100 tewas di lokasi tempat penyergapan tersebut.

Di waktu yang hampir bersamaan dengan peristiwa itu, dua ledakan bom terjadi di luar stadion Stade de France saat pertandingan uji coba Internasional antara kesebelasan Perancis melawan Jerman.

Dilaporkan juga, empat orang milisi penyandera tewas di dalam gedung teater, tiga di antaranya dengan mengaktifkan rompi bunuh diri, sementara satu lainnya karena ditembak polisi. Tiga milisi lainnya tewas di dekat stadion nasional dan satu milisi ditemukan tewas di jalanan di Paris bagian timur.

Atas dua peristiwa ini, Presiden Prancis Francois Hollande mengumumkan negara dalam keadaan darurat setelah melakukan rapat darurat setelah peristiwa ini. Dia juga memutuskan untuk memimpin langsung operasi penumpasan kelompok bersenjata yang melakukan aksi penyanderaan di di Gedung Teater Bataclan di pusat kota Paris .

Hollande membatalkan kunjungannya ke Turki untuk pertemuan G-20 akibat peristiwa ini.

/Sukardjito





Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kanan) berbincang dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kedua kanan) di Gedung Putih, Washington, Senin (26/10).

Anggaran Lobi Kunjungan Jokowi

Presiden Jokowi menggunakan jasa pelobi dalam kunjungannya ke Amerika Serikat 26-28 Oktober 2015 lalu. Nilai jasanya mencapai USD80 ribu atau sekitar Rp1,08 miliar untuk memfasilitasi kunjungan sekaligus pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden AS Barack Obama.

Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, mengungkap skandal tersebut sebagaimana dituliskan dalam artikel berjudul 'Waiting In The White House Lobby' yang dipublikasikan laman *New Mandala*, Jumat (6/11).

Kunjungan Jokowi ke Amerika,

ungkap dia, sebenarnya sudah dipersiapkan dengan matang oleh Luhut Binsar Panjaitan sejak Maret 2015. Luhut saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya diteken perjanjian pada 8 Juni dan dicatat Departemen Kehakiman AS dibawah aturan Foreign Agent Registration Act (FARA) pada 17 Juni.

Dalam dokumen itu dijabarkan bagaimana kesepakatan kerjasama dengan nilai USD80 ribu antara perusahaan konsultan Singapura Pereira International Pte LTD dengan perusahaan PR asal Las Vegas yakni R&R Partner's Inc. Pembayaran dilakukan dalam empat kali angsuran antara 15 Juni hingga 1 September

2015.

Apa yang harus dikerjakan R&R Partner's Inc dalam kerjasama tersebut, dijelaskan dengan rinci tugasnya dalam tiga poin besar. Pertama mengatur jadwal pertemuan dengan pembuat kebijakan dan anggota parlemen, serta eksekutif lainnya, termasuk departemen luar negeri.

Kedua mengamankan kesempatan untuk sesi gabungan kongres selama kunjungan Presiden Jokowi di Washington DC dan terakhir mengidentifikasi dan bekerja dengan pihak, media serta organisasi swasta yang dianggap berpengaruh di Amerika Serikat untuk mendukung upaya Presiden Jokowi.



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tegas menepis anggapan Michael Buehler. Dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (7/11), ia menekankan bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke AS telah dipersiapkan oleh pejabat dan menteri terkait secara resmi dan formal dengan melalui berbagai rapat. Baik rapat dengan Pemerintah AS maupun diinternal pemerintah RI.

Dibeberkan bagaimana rencana awal kunjungan Jokowi ke AS. Yakni dari pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden AS Barack Obama disela-sela KTT APEC di Beijing, 10 November 2014. Saat itu, Obama secara lisan mengundang Jokowi ke AS. Obama mempertegas undangannya dengan berkirim surat resmi ke pemerintah Indonesia pada Maret 2015.

Sejak Maret itulah Retno mengaku mempersiapkan semuanya dengan kementerian terkait hingga pelaksanaan kunjungan pada akhir Oktober 2015.

"Semua data terekam dengan baik dan persiapan itu melibatkan tim kita yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Kementerian Luar Negeri tidak menggunakan lobi atau bayar lobbyist dalam persiapan kunjungan Presiden

Jokowi ke Amerika Serikat," kata dia.

Berbeda dengan Retno, Wapres Jusuf Kalla mengakui penggunaan jasa lobi merupakan hal yang lazim. legal dan bahkan penggunaannya merupakan bagian tak terpisahkan dari perpolitikan di Amerika. Jasa lobi sering digunakan pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di AS.

Lobi menjadi hal resmi atau legal termasuk dalam pembahasan suatu Undang-Undang di parlemen. Perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan aturan tertentu misalnya, diberikan kesempatan untuk melakukan lobi-lobi guna mencapai tujuannya. Tetapi lobi dilakukan secara formal dan terbuka.

"Di Amerika, lobi itu hal yang biasa, seperti lobi di bidang perdagangan atau lobi dengan parlemen. Kalau di kita (Indonesia) mungkin lobi masih dilakukan secara pribadi, tidak resmi," ucap JK di Balikpapan, Sabtu (7/11).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, tidak mau terjebak atas pencuatnya penggunaan jasa lobi dalam

kunjungan Presiden Jokowi ke AS. Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu malah mengusulkan adanya alokasi anggaran dalam APBN untuk penggunaan jasa lobi.

"Kami setuju karena itu kepentingan kita juga, yaitu membuka lapangan pekerjaan, agar produk dalam negeri yang diekspor menjadi lebih banyak, dan pendapatan negara akan bertambah. Jadi saling membutuhkan," ucap Luhut.

Usulan Luhut mendapatkan sambutan DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan usulan dimasukkannya anggaran khusus bagi jasa lobi pemerintah ke negara lain.

"Maksud Pak Luhut masukan uang untuk melobi negara lain, wajar juga. (Tetapi) itu perlu ada Undang-undangnya terlebih dahulu," kata dia di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (10/11) pekan lalu.

Transparansi Jasa Lobi

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mendukung masuknya anggaran jasa lobi dalam APBN. Dengan catatan, semuanya dilakukan secara transparan dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan rakyat Indonesia.

"Indonesia dapat menggunakan jasa lobi di Amerika Serikat dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sepanjang apa yang diinginkan jelas serta transparan," ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Kamis (12/11).

Jasa pelobi, ditekankan dia untuk mengisi pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh para diplomat dalam menjalankan lobi. Dalam pembahasan suatu aturan misalnya, diplomat umumnya menunggu anggota kongres dan senat menyampaikan argumentasi terlebih dulu untuk kemudian dilakukan komunikasi. Nah, keberadaan jasa lobi inilah diharapkan bisa menembus sebelum argumentasi-argumentasi itu muncul. ■ Soemitro

Sering Sakit Gigi karena Sosmed, Alasan Luhut Dukung SE Hate Speech

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, surat edaran Kapolri soal ujaran kebencian atau *hate speech* untuk mengatur dan mewujudkan demokrasi yang bertanggung jawab.

Luhut menegaskan, SE tersebut bukan bermaksud mengekang kebebasan berekspresi atau ingin mengembalikan pemerintahan yang otoriter seperti zaman Orde Baru.

“Tidak akan mengekang, sesuai ikuti aturan main. Saya bilang ke Kapolri, *you go a head*. Saya tanggung jawab. Saya hanya ingin aturan yang ada disepakati. Tulisan penghinaan itu keterlaluan,” kata Luhut di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/11).

Dia mengaku ingin menjadikan Indonesia lebih disiplin tapi tidak mengekang. Sehingga ada aturan main yang harus disepakati.

Dia mengakui selama ini sudah jengkel dengan adanya tulisan-tulisan yang mengandung unsur penghinaan



“Negara ini harus kita disiplinkan. Ada *rule* yang harus kita sepakati karena kalau tidak negara ini menjadi negara liar. Tidak ada tanggungjawab,” ujarnya.

Sambil guyon, Luhut mengaku selalu sakit gigi setiap membaca sosial media yang sudah kebablasan dalam mengutarakan ketidaksenangan atau mengungkapkan kebencian terhadap sesama anak bangsa.

“Saya setiap baca sosmed ini selalu sakit gigi, kalau didiamkan membuat bangsa ini menjadi pendendam,” ujar Luhut dengan canda. /Wisnu

Sejumlah Tokoh Deklarasikan “Gerakan Selamatkan NKRI”

Sejumlah tokoh nasional, aktivis dan pensiunan jenderal, resmi mendeklarasikan ‘Gerakan Selamatkan NKRI’. Deklarasi ini lahir dari kegelisahan atas situasi negara saat ini.

Pendeklarasian ini dilakukan di salah satu restoran di Jakarta Selatan, Kamis (12/11), dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh dan politisi nasional.

Tokoh-tokoh itu yang hadir adalah, Mantan Panglima TNI Jendral Djoko Santoso, Mantan Wagub DKI Priyanto, Politisi Senior Golongan Karya Aryadi Ahmad, Hatta Taliwang, LetJend (Purn) Soeharto, Bursah Zarnubi, Politisi senior partai Demokrat Ahmad Mubarak, tokoh aktivis 65 Hariman Siregar, Ichsanuddin Noorsy, Marsekal Muda (Purn) Amirullah, dan adik kandung

Almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Lili Wahid.

Selain itu hadir pula organisasi beberapa kepemudaan dan kemahasiswaan seperti FKPP, KAMMI, APKLI, KAHMI, IMM dan Serikat Pribumi.

“Awal muncul gerakan ini berawal dari tulisan rekan-rekan digroup WA (whatsapp) tentang kondisi negara kita sekarang ini, sampai dideklarsikan,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI Priyanto, ketika membuka pendeklarasian.

Dari pendeklarasian itu, Gerakan Selamatkan NKRI, melahirkan tuntutan yakni, Kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Prioritaskan Penggunaan Produk Anak Bangsa serta Tolak Buruh Asing. Zaenal Arifin-Muhammad Kemal Macharani

DPR Ingatkan Waspadaai Pengadilan Rakyat di Den Haag

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq mengatakan Indonesia harus mewaspadai agenda dibalik penyelenggaraan Pengadilan Rakyat pada 10-13 November 2015.

“Rencana sejumlah aktivis bersama elemen keluarga eks-PKI menggelar pengadilan rakyat atas peristiwa 1965 harus dicermati dan diwaspadai pemerintah dan semua pihak,” kata Mahfudz, di Jakarta, Jumat (13/11).

Mahfudz menilai agenda itu akan menjadi pintu masuk bagi gugatan hukum internasional terhadap dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus-kasus itu menurut dia adalah bagian sejarah masa lalu yang semestinya sudah ditutup rapat, jika Indonesia ingin melangkah mantap kedepan.

“Bisa dipastikan agenda ini jadi pintu masuk untuk menciptakan destabilitas politik dan mendekonstruksi institusi TNI,” ujarnya.

Dijelaskan, ketika kekuatan asing sudah mampu mengontrol elemen-elemen masyarakat sipil dan masyarakat politik juga semakin terdelegitimasi di era demokrasi liberal, serta elemen masyarakat ekonomi makin terkooptasi oleh sistem kapitalis dunia, maka yang tersisa adalah institusi TNI.

“Rencana pengadilan rakyat internasional harus dibaca dalam alur skenario ini,” katanya.

Menurut dia, Pemerintahan Jokowi jangan pernah ‘bermain api’ dalam isu kasus 1965.

Sebelumnya, pengadilan rakyat atau ‘International People’s Tribunal’ kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada 1965 digelar di Den Haag, Belanda dari Selasa-Jumat (10-13 November 2015). / Karek Stefanus Ratulangi-Ant



Langgar Batas Wilayah, TNI AU Paksa Turun Pesawat Asing



TNI Angkatan Udara (AU) melakukan operasi pendaratan paksa pesawat kecil jenis Propeler First Engine Cessna dengan nomor lambung N96706 dengan pilot Letkol James Patrick Murphy (US Navy/Penerbang AL Amerika Serikat) di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, Senin, sekitar pukul 14.31 Wita.

“Pesawat asing tersebut masuk

wilayah kedaulatan NKRI dan operasi turun paksa pesawat dilaksanakan oleh dua pesawat Sukhoi TNI AU dari Kohanudnas Skadron Makassar dengan Pilot Mayor Pnb Anton Pallaguna dan Mayor Pnb Baskoro,” kata Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Inf Andi Gunawan, di Balikpapan, Senin (9/11).

Pesawat yang diawaki satu orang tersebut sebelumnya melintas di wilayah perbatasan udara Indonesia – Malaysia – Filipina dan terpantau di radar TNI-AU.

“Selanjutnya pilot pesawat asing tersebut masih berada di ruang BO AirNav Bandara Juwata Tarakan untuk diinterogasi secara tertutup oleh Pangkalan TNI AU Tarakan,” kata Andi.

Saat ini di Tarakan tidak ada pesawat tempur yang *stand by*, hanya ada satuan Radar 225 Mabes TNI yang beroperasi, katanya.

“Namun jika hasil operasi pantau udara lewat radar kita tersebut menangkap sinyal pesawat lewat tanpa kode atau identitas maka dianggap sebagai pelanggaran wilayah udara suatu negara,” kata Andi.

Objek terbang tanpa identifikasi tersebut oleh Satuan Radar 225 Tarakan langsung dilaporkan ke Markas Kosek Hanudnas di Makassar, katanya.

“Selanjutnya pesawat dari Makassar langsung melakukan pengejaran pesawat dari Skadron tempur dari Makasar dan yang ditangkap adalah pesawat sipil,” kata Andi.

Pilot pesawat tersebut seorang anggota dari US Navy Reserve yang sedang cuti. Dia terbang dari Hawaii ke Filipina dan rencananya ke Singapura, tapi melanggar batas wilayah udara Indonesia sehingga tertangkap oleh radar. /Karel Stefanus Ratulangi-Ant

Kerugian Negara di Pelindo II Lebih Besar dari Century

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai kerugian negara yang disebabkan oleh Pelindo II lebih besar dari kasus Century. Oleh karenanya, Pansus memanggil Dirjen Pajak untuk menelusuri indikasi kerugian tersebut.

“Kita memanggil dirjen pajak, karena ada indikasi pajak dan kita sudah menelusuri. Nilainya belum bisa disebutkan makanya kita panggil dirjen pajak, karena pajak BUMN ini tahun kemarin dapat Rp170 T. Kalau tata kelola BUMN baik, saya kira dapat masuk pajak yang lebih besar,” ujar Rieke di DPR, Jakarta, Rabu (11/11).

Rieke menuturkan ada potensi yang harus dicermati dari segi pajak masuk, terlebih lagi Pelindo merupakan pelabuhan utama.

“Makanya dari awal kita katakan, permasalahannya memperbaiki tata kelola BUMN kita, termasuk kepatuhan terhadap pajak,” katanya.

Politisi PDIP ini mengaku terkejut dengan temuan yang mengindikasikan kerugian yang lebih besar dari Century



yang mencapai Rp6,7 triliun.

“Indikasinya, kasus ini saya juga kaget sepertinya bisa lebih besar dari kasus century. Dari data-data yang masuk dari analisa keuangan dan sebagainya, saya kira ada data yang mengejutkan, saya sendiri *shock*, terlebih lagi masuk ke sini karena hukum ke tenaga kerja yang dilanggar, tapi setelah di bongkar ya ampun ini lebih besar dari century kerugian negaranya,”

“Tapi memang mungkin itu tidak tersosialisasi cukup baik kepada publik dan sangat sistematis. Dan indikasi kejahatan korporsinya bukan hanya di dalam negeri tapi global sehingga butuh semacam kerja ekstra dan komitmen komite pansus,” papar Rieke.

Namun, Rieke masih enggan menyebutkan nominal pasti besarnya kerugian negara dalam kasus Pelindo II ini. /Karel Stefanus Ratulangi-Nailin In Saroh



RELASI AGAMA DAN NEGARA

Dalam sebuah kesempatan, Aktual sempat berbincang dengan Olly Dondokambey soal politik, demokrasi dan relasi antara agama dan negara.

Olly Dondokambey meyakini bahwa ada hubungan interaktif, mutualisme dan tak terpisah antara negara dan agama meski banyak kalangan masih banyak menilai bahwa negara dan gereja adalah entitas yang berbeda.

Pengalaman dan sejarah hidupnya lah yang membuat dia yakin akan hal itu. “Sejak terjun ke dunia politik, saya insaf akan satu hal penting, yakni bahwa hidup saya digerakkan oleh dua entitas besar yakni gereja disatu sisi dan negara di sisi lain. Dua entitas besar ini memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan pengambilan keputusan saya sesuai kapasitasnya masing-masing”. Demikian Olly memulai obrolan awalnya dengan Aktual.

Dua orang teolog penting Protestan yakni Johannes Calvin dan Hans Kung rupanya sangat mempengaruhi cara Bapak dua orang anak ini terhadap relasi gereja dan negara.

Calvin mengatakan meski secara fisik, entitas negara dan gereja berbeda namun sebenarnya keduanya adalah dua persekutuan hidup yang saling berdampingan dan bersama-sama bertugas menjalankan kehendak Tuhan.

Mirip Calvin, Kung melihat posisi negara dan gereja harus sejajar dan saling melengkapi karena keduanya memiliki nilai universal yang sama untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai –nilai humanisme (kemanusiaan).

“Berpolitik akan menjadi sarana untuk menyalurkan tugas profetisewartakan kerajaan Allah...Kristianitas mengandung seperangkat nilai yang sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tulis suami Rita M. Tumuntuan ini.

Cara pandang terhadap relasi negara dan gereja ini juga yang membawa pria kelahiran Manado ini dalam memahami hakikat kepemimpinan dan cara berpolitik yang benar dalam sebuah negara demokrasi.

Kepemimpinan Kristiani seharusnya menyandarkan pada basis dasar moral Kristiani seperti yang dicontohkan Yesus dan tokoh-tokoh pemimpin dalam Kitab Suci yakni takut kepada Allah. Ketika landasan moral Kristiani mampu membimbing setiap umat kristiani dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara maka keadilan dan kesejahteraan bangsa pasti akan tercapai.

Demikian cuplikan bincang Aktual dengan Olly Dondokambey.

Bagaimana Anda memahami relasi antara gereja dan negara?

Begini. Harus dipahamai memang, ada sebagian yang masih meyakini bahwa tidak ada hubungan antara gereja dan negara. Gereja hanya dipahami sebagai entitas yang hanya mengurus masalah-masalah etika, moralitas atau yang soal-soal yang berhubungan dengan ketuhanan. Dan negara hanya dibatasi pada urusan-urusan yang sifatnya materi, keduniaan dan administratif.

Namun, saya salah satu orang yang memercayai bahwa relasi antara gereja dan negara itu sangat kuat.

Relasi seperti apa itu?

Sebuah negara pada hakikatnya memiliki tujuan luhur yang sama dengan gereja. Martin Luther kan pernah mengatakan bahwa gereja dan negara adalah dua kerajaan terpisah yang penuh dengan titik singgung.

Apa titik singgung itu? Banyak sekali kalau saya mau ceritakan hal itu. Ingat tadi, tujuan luhur sebuah negara kan salah satunya adalah membuat rakyat yang tinggal di dalam negara itu hidup dalam alam damai dan sejahtera. Gereja pun sama, pokok seluruh pewartaan Yesus adalah kehidupan damai dan kasih. Ini titik penting dari semua titik singgung itu.

Benarkah alasan itu jadi motivasi Anda untuk terjun ke dunia politik?

Ya. Sejak terjun ke dunia politik, saya insaf akan satu hal penting, yakni bahwa hidup saya digerakkan oleh dua entitas besar yakni gereja di satu sisi dan negara di sisi lain. Dua entitas besar ini memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan pengambilan keputusan saya sesuai kapasitasnya masing-masing.

Bagi saya, berpolitik adalah salah satu cara untuk menegosiasikan atau merelasikan fungsi-fungsi negara dengan prinsip-prinsip dasar Kristianitas seperti kasih, damai, jujur, opsi kepada rakyat

miskin, rakyat terlantar, rakyat yang terabaikan atau kelompok yang termarginalkan.

Oleh karena itu, dengan berpolitik saya bisa mengubah prinsip-prinsip dasar Kristiani itu dari sebatas konsep menjadi sebuah realitas dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita ini, Indonesia.

Anda yakin politik dan moralitas (Kristiani) bisa bergandengan tangan?

Mengapa tidak? Bagi saya, berpolitik adalah tanggapan terhadap ajaran Yesus. Politik bukan wilayah tabu yang harus dijaui atau dosa yang harus dihindari.

Ya. Harus disadari bahwa masih ada tindakan atau sikap a-politik di kalangan jemaat Kristiani sendiri. Masih ada yang alergi terhadap politik. Ini saya pahami karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*.

Karena itu, seorang politikus sering diindetikkan dengan orang-orang yang melulu mencari kekuasaan saja. Orang-orang yang selalu menggunakan cara kotor, licik, penuh intrik dan sebagainya hanya untuk mencari kekuasaan. Apalagi banyak kasus, kekuasaan justru dijadikan alat penindasan rakyat kecil. Saya memahami benar, citra seperti ini justru menjadikan politik atau politikus seperti saya menjadi buruk.

Tapi kalau melihat negarawan dan politikus Kristen seperti DR Sam Ratulangi, IJ Kasimo, Leimena, Tambunan, AA Maramis, Johannes Latuharhary atau Parada Harahap misalnya. Dengan moral Kristiani sebagai landasan berpolitik mereka, saya yakin itu adalah contoh bagaimana umat Kristiani berpolitik. Contoh bagaimana moral Kristiani menjadi pegangan seorang politikus untuk menjadikan bangsa dan negara ini adil makmur dan sejahtera.

Kalau saya mengambil dari YB



Mangunwijaya (Romo Mangun), dia mengatakan politik adalah pengabdian kepada kepentingan masyarakat, bangsa. Yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat. Bukan pengelola negara.

Saya berharap bisa seperti mereka.

Realitasnya, saat ini politik adalah salah satu faktor penting yang membuat kegagalan proses kepemimpinan di negara ini. Yang kemudian bisa memicu krisis.

Ketika terjadi krisis dalam sebuah negara, hakikatnya krisis itu adalah mulai renggangnya relasi antara negara dan agama. Salah satu faktor penyebabnya adalah kepemimpinan yang tak mampu menjaga hubungan antara negara dan agama.

Ketika sebuah kepemimpinan



tak mampu melakukan hal itu maka yang terjadi adalah kehidupan berbangsa dan bernegara akan jauh dari nilai dan moral kemanusiaan. Ini alasan dan hakikat mengapa krisis sosial yang terjadi di sebuah negara adalah cermin dari krisis kepemimpinan yang terjadi di negara itu.

Kepemimpinan Kristiani seharusnya menyandarkan pada basis dasar moral Kristiani seperti yang dicontohkan Yesus dan tokoh-tokoh pemimpin dalam Kitab Suci yakni takut kepada Allah. Ketika landasan moral Kristiani mampu membimbing setiap umat Kristiani dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara maka keadilan dan kesejahteraan pasti akan tercapai.

Begitu pula dengan seorang pemimpin. Contoh dan keteladanan

kepemimpinan Yesus sebenarnya sudah bisa dijadikan pegangan: Kepemimpinan Hamba dan Kepemimpinan yang Melayani. Yesus melakukan dua hakikat kepemimpinan tersebut dengan hati. Bukan dengan nafsu.

Hakikat seorang pemimpin adalah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bukan hamba ambisi, pelayan ambisi. Bukan hamba harta, pelayan harta. Dan bukan hamba ketenaran atau hamba kekuasaan. Semangat ini yang hampir hilang dari proses kepemimpinan di negara ini.

Lalu, apa yang Anda inginkan dengan berpolitik?

Sejak kecil, saya selalu dihadapkan pada realitas kemiskinan, ketertindasan dan orang-orang lemah di sekeliling

saya. Saya besar dengan realitas seperti itu. Saya tidak ingin lagi ada kemiskinan dan ketertindasan di sekeliling saya.

Saya sadar, bahwa hanya dengan terlibat dalam urusan politik saya sanggup, paling tidak, memperjuangkan aspirasi mereka melalui sebuah perjuangan politik yang bermartabat. Tapi ingat, politik yang bermartabat dan bermoral tidak berangkat dari ruang kosong dan hampa. Perjuangan politik harus berawal dari sebuah realitas sosial masyarakat yang tersisih dan tertindas. Pemimpin dan politisi yang solider saya kira harus merasakan bagaimana rasanya jika kita seperti orang-orang tersisih dan telantar. Tanpa menyentuh kehidupannya, solidaritas tak akan terjadi.

Untuk itu, saya terpanggil dan mencoba untuk bergulat dalam politik. Meski banyak orang yang pesimistis dan sindir saya bahwa saya hanya ingin mencari kekuasaan. Tapi saya tak gentar dengan sindiran itu. Karena seorang politisi harus memiliki karakter, jati diri.

Harus menjadi manusia yang hidup bukan karena penilaian-penilaian pihak lain, tetapi yang hidup menurut nilai-nilai positif yang menurut dia benar dan baik.

Sebagai umat Kristiani, saya tidak boleh menarik diri ke rumah siput kehangatan kehidupan gereja.

Umat Kristiani di Indonesia harus benar-benar sadar bahwa salah satu jalan untuk mencapai keselamatan dan membantu sesama saudara yang menderita adalah melibatkan diri dalam dunia politik.

Dengan bersandar teguh pada nilai Kristiani maka nilai-nilai kemanusiaan dalam proses berbangsa dan bernegara akan terwujud.

Nilai-nilai yang diajarkan Yesus seperti cinta kasih, kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan akan terwujud dalam perjalanan bangsa ini dalam bernegara.

Bagi saya berpolitik adalah menjadi saksi Kristus. ◦



Skema TPP: Daulat Rakyat Hancur, Daulat Negara Porak-Poranda

Ketika bertemu Presiden Barrack Obama, secara mengejutkan Presiden Jokowi isyaratkan bersedia bergabung dalam Kemitraan Lintas Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP). Sebuah blok ekonomi baru di Asia Pasifik yang dimotori Amerika Serikat dan Jepang. Bukti nyata ketika pengalaman politik seorang presiden sangat minim, bisa berakibat fatal ketika berdiplomasi dengan pemerintahan adikuasa seperti Amerika Serikat.

Sekadar informasi, TPP—sebelumnya bernama Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSE) jelas-jelas merupakan skema liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang

komprehensif, terjadwal, dan mengikat. Bahkan, TPP disebut-sebut lebih berbahaya karena mencakup isu-isu World Trade Organization (WTO)-Plus.

Skema TPP yang berawal dari

desakan sekitar 600 korporasi global kepada Kementerian Perdagangan AS, bakal jadi jalan masuk ke akses pasar yang lebih luas seperti Indonesia, karena memberi gambaran keuntungan yang besar di tengah terpuruknya ekonomi AS dan Eropa. Apalagi sekarang Indonesia tetap jadi sasaran pasif untuk dijadikan pasar penjualan produk-produk asing maupun investasi. Mengingat hingga kini ekonomi kita belum berbasis industri.

Lepas dari itu, setidaknya dua sektor yang jelas-jelas terkait hajat hidup rakyat bakal hancur lebur gara-gara diterapkannya skema TPP. Yaitu

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kanan) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) bersalaman setelah pertemuan mereka di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Senin (26/10).

sektor kesehatan dan pangan. Bagi para “Pemangku Kepentingan” sektor kesehatan di Indonesia kiranya cukup beralasan untuk khawatir. Sebab jika skema HKI diterapkan di Indonesia di sektor kesehatan maka akan menghilangkan akses masyarakat untuk membeli obat-obatan dengan murah dan terjangkau. Karena melalui penerapan HKI, TPP berhak menghapus ketentuan fleksibilitas The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS) dalam World Trade Organization (WTO). Karena melalui skema TRIPS inilah, banyak negara-negara berkembang dimungkinkan untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan oleh Perusahaan Farmasi Amerika demi kepentingan publik.

Maka dengan penghapusan ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP bisa berakibat terciptanya monopoli obat-obatan yang dilakukan oleh korporasi asing dengan harga yang cukup mahal. Apalagi melalui skema TRIPS, TPP akan memberikan jaminan perlindungan paten lebih dari 20 tahun. Apalagi TPP juga akan menerapkan eksklusivitas data yang telah dipatenkan.

Tak bisa dibantah bahwa melalui skema TRIPS di TPP ini, hanya akan menguntungkan korporasi-korporasi berskala global yang bermain di bidang kesehatan.

Lantas, bagaimana halnya di sektor pertanian khususnya di sektor pangan? Ternyata juga sama mengkhawatirkannya seperti juga di sektor farmasi dan obat-obatan. Selama ini, perusahaan benih dan pestisida asing, seperti Bayer, Monsanto, maupun DuPont, telah memonopoli benih-benih ciptaannya. Karenanya, tidak memungkinkan petani kecil membudidayakan. Dengan jaminan perlindungan paten yang tinggi dalam TPP, korban-korban kasus kriminalisasi

benih akan meningkat akibat diberlakukannya TPP.

Apalagi tanpa skema HKI di TPP inipun, fakta membuktikan bahwa sektor pertanian Indonesia sudah dikuasai monopoli kartel asing. Yang itu berarti, kartel internasional dan nasional pada sektor pangan diduga mengendalikan harga, stok, dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri. Di pasar internasional, setidaknya terdapat 12 perusahaan multinasional yang diduga terlibat kartel sereal, agrokimia, dan bibit tanaman pangan. Di dalam negeri ada 11 perusahaan dan enam pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.

Beberapa waktu lalu Komite Ekonomi Nasional (KEN) misalnya menyebutkan di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut “ABCD”, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90 persen pangsa perdagangan sereal (biji-bijian) dunia. Struktur pasar komoditas pangan juga memiliki kecenderungan oligopolistik.

Dalam industri agrokimia global juga terdapat enam perusahaan multinasional, yaitu Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, dan BASF yang menguasai 75 persen pangsa pasar global. Dalam industri



bibit terdapat empat perusahaan multinasional, yakni Monsanto, Dupont, Syngenta, dan Limagrain, dengan penguasaan 50 persen perdagangan bibit global.

Pada sektor pangan, kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing. Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika). Sementara itu, tren misalnya pada impor daging mayoritas rupanya dari Australia, bawang putih dari Cina, dan bawang merah dari Filipina.

Dengan begitu, yang memperoleh keuntungan di sektor pertanian Indonesia bukanlah petani atau para pemangku kepentingan pertanian pada umumnya, melainkan terpusat hanya di tangan segelintir para pebisnis yang menciptakan monopoli tersebut.

Monopoli lalu menjadikan sistem perbenihan dan pertanian khususnya membangun oligopoli, Lantas siapa target sasaran bisnisnya yang kemudian jadi korban? Yang jadi korban adalah para Petani kecil yang pada dasarnya masuk golongan ekonomi lemah dan kecil.

Bukan itu saja. Jika Skema TPP ini diterapkan, dipastikan Indonesia akan diikat dengan kewajiban mereduksi tarifnya hingga mencapai nol persen pada semua pos tarif di semua sektor, termasuk sektor sensitif seperti kesehatan, asuransi, dan jasa keuangan.

Dalam lingkup yang lebih luas, Indonesia juga wajib menerapkan kebijakan pengurangan biaya transaksi perdagangan, kebijakan kompetisi, government procurement, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kebijakan investasi.

Selain itu, TPP juga tidak senafas dengan prinsip “Sentralisasi ASEAN” yang selama ini jadi pijakan politik luar negeri Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai basis kelembagaan dari semua bentuk kerjasama regional. ◦ Hendrajit

TPP pada hakekatnya merupakan kesepakatan rahasia beberapa negara untuk menguasai perdagangan global di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui skema TPP ini bermaksud menjadikan dirinya sebagai Kutub Tunggal.

Pada 2 Juli 2015 lalu, Wikileaks kembali mengungkap beberapa fakta penting mengenai beberapa draf kesepakatan rahasia antarnegara dalam skema Trade in Services Agreement (TiSA) yang dimotori oleh AS dan Uni Eropa. Menurut data yang dirilis oleh Wikileaks, hingga kini ada 23 negara sudah melakukan negosiasi yaitu Australia, Kanada, Chile, Taiwan, Kolombia, Kostarika, Hongkong, Iceland, Israel, Jepang, Liechtenstein, Meksiko Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Pakistan, Panama, Uruguay, Paraguay, Peru, Korea Selatan, Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa (mewakili 28 negara, termasuk Inggris).

Dari 17 draf dokumen penting skema TISA yang saat ini masih dalam negosiasi yang sifatnya rahasia dan tertutup, dokumen tersebut menyiratkan beberapa kesepakatan penting untuk menghiangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa antarnegara.

Wikileaks menulis:

“While the proposed Trans Pacific Partnership (TPP) and the Transatlantic Trade and Investment Pact (TTIP) have become well known in recent months, the TISA is the largest component of the United States strategic neoliberal trade treaty triumvirate. Together, the three treaties form not only a new legal order shaped for transnational corporations, but a new economic grand enclosure, which excludes China and all other BRICS countries.”

Tak pelak lagi TiSA merupakan komponen strategis untuk memainkan skema ekonomi neoliberal AS terhadap berbagai negara. Sehingga tidak berlebihan



Bocoran Wikileaks Tentang TPP

kiranya jika TiSA dan TPP merupakan sebuah kesepakatan yang tingkatan daya rusaknya melebihi WTO dan NAFTA.

Dalam sebuah laporannya yang berjudul TiSA versus Public Services,

Public Services International, sebuah organisasi federasi lembaga persatuan pekerja publik internasional yang beranggotakan sekitar 20 juta pekerja publik yang tersebar di 154 negara, antara lain



menulis sebagai berikut:

“Current treaties have developed into constitutional-style documents that tie governments’ heads in many areas only loosely related to trade. These include patent protections for drugs, local government purchasing, foreign investor rights, public services and public interest regulation, which can have consequences in areas such as labour, the environment and Internet Freedom.”

Selain itu, dengan merujuk pada artikel dari Emma Woolcott, kontributor *forbes.com*, ada dugaan kuat bahwa dalam sebuah klausulnya, setiap negara yang ikut meratifikasi TiSA diwajibkan untuk mengizinkan *data base* kependudukannya untuk diakses oleh negara, lembaga, perusahaan atau individu negara lain.

Namun, apa agenda tersembunyi dari TiSA kiranya yang jauh lebih penting untuk diungkap. Berdasarkan diskusi terbatas antar beberapa

peneliti senior Global Future Institute, tujuan TiSA nampaknya bukan sekadar untuk meliberalisasi perdagangan jasa antarnegara anggota TiSA. Lebih dalam dari itu, sepertinya TiSA bertujuan untuk memaksa negara-negara yang tergabung dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan), maupun negara-negara yang tergabung dalam ASEAN serta beberapa negara berkembang lainnya, agar tunduk dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh TiSA.

Hal ini membuktikan bahwa AS dan Uni Eropa memandang dirinya sebagai kutub tunggal dan menafikan keberadaan kekuatan-kekuatan alternatif di luar orbit mereka sebagai kutub tersendiri yang patut diperhitungkan. Sehingga kekuatan-kekuatan baru seperti BRICS dan ASEAN sudah sewajarnya untuk terintegrasi dalam skema TiSA dan TPP.

Apalagi dalam perhitungan negara-negara yang tergabung TiSA, jika total perdagangan jasa antarnegara yang tergabung dalam TiSA digabung menjadi satu, maka diperkirakan TiSA akan menguasai dua pertiga GDP global.

Karena itu menarik menyorot beberapa poin yang jadi dasar penolakan Indonesia for Global Justice. Antaranya, TPP mendorong negara-negara untuk membuka sektor publiknya untuk dapat dimasuki oleh investasi asing, khususnya Amerika, hingga 100 persen. Segala bentuk daftar negatif investasi di sektor ini diminimalisasi. Tentu penguasaan sektor publik oleh korporasi akan berdampak terhadap hilangnya akses masyarakat terhadap sektor publik strategi secara murah, seperti air dan listrik.

Juga, TPP mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diakses oleh perusahaan asing sehingga TPP mengatur tentang perlunya prinsip nondiskriminasi dan national treatment untuk perusahaan asing dalam kegiatan ini. Hal ini karena AS

mengincar bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai triliunan dolar AS.

Di sektor BUMN, skema TPP juga bisa bikin babak belur. Sebab TPP hendak memastikan negara tidak akan memberikan banyak subsidi untuk BUMN sehingga korporasi asing bisa memenangkan kompetisi. Selama ini, BUMN dianggap telah memonopoli bisnis di level domestik melalui dukungan negara, baik dalam bentuk pinjaman yang murah, pengecualian pajak, maupun kemewahan untuk dapat mengecualikan sebuah undang-undang. TPP akan menerapkan prinsip nondiskriminasi serta hukum kompetisi yang ketat bagi BUMN.

Dan jangan anggap enteng soal Hak Kekayaan Intelektual. Penerapan standar perlindungan paten dalam aturan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam TPP telah menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah. Hal ini karena TPP menghapus ketentuan fleksibilitas The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dalam WTO, yang selama ini digunakan banyak negara untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan oleh perusahaan farmasi Amerika demi kepentingan publik.

Penghapusan ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP mengakibatkan monopoli obat-obatan oleh korporasi asing dengan harga mahal. Apalagi TPP menerapkan standar perlindungan lebih tinggi dari TRIPS di WTO, yakni dengan jaminan perlindungan paten lebih dari 20 tahun. Selain itu, TPP juga menerapkan eksklusivitas data yang telah dipatenkan.

Sektor perburuan barang tentu tak kalah mengkhawatirkan. Sebab Skema TPP hendak melarang negara membuat regulasi yang melindungi buruh, bahkan tidak menginginkan adanya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan dalam rangka menguntungkan investor. Selain itu,

arus bebas tenaga kerja asing untuk tenaga kerja profesional juga menjadi salah satu agendanya.

Lantas bagaimana nasib pengusaha menengah dan kecil dengan adanya TPP? Bisa dipastikan akan mematikan bisnis mereka. Betapa tidak. Penghapusan tarif hingga batas serendah-rendahnya akan memudahkan produk AS dan negara industri lainnya masuk, ketimbang masuknya produk barang Indonesia ke sana. Apalagi standar akses pasar yang tinggi dalam TPP akan berpotensi menghilangkan kemampuan sektor usaha kecil Indonesia untuk dapat masuk ke pasar negara-negara TPP.

Mau yang lebih menyeramkan lagi? Baiklah. Jika Indonesia bergabung dengan TPP, penghapusan hambatan tarif tidak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan kinerja perdagangannya, khususnya di tengah situasi pelemahan ekonomi global saat ini.

Hal ini didukung dengan data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, 80 persen di antaranya terus mengalami kecenderungan negatif dari seluruh total perdagangan.

Neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan defisit, seperti Australia, Brunei, Cile, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Vietnam. Bahkan, ada beberapa negara yang menunjukkan tren perdagangan Indonesia dengan mitranya ini di sepanjang 2010-2014. Hal itu menunjukkan kecenderungan negatif, seperti dengan Amerika Serikat (-0,11 persen), Brunei (-9,42 persen), Cile (-6,86 persen), dan Jepang (2,57 persen).

Dan di atas itu semua, diberlakukannya TPP akan menghancurkan daulat hukum nasional Indonesia. Sebab melalui TPP, korporasi-korporasi global itu akan memasukkan aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara Investor dan negara, atau dikenal dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS).



Masuknya ISDS dalam TPP akan membuka peluang Indonesia digugat oleh investor senilai triliunan dolar AS di lembaga arbitrase internasional akibat mengganti ataupun mengubah regulasi nasionalnya yang dianggap merugikan kepentingan investor asing. Ancaman gugatan ini mengakibatkan Indonesia tersandera dan enggan membuat undang-undang yang melindungi kepentingan rakyat.

Maka, tidak saja daulat rakyat akan hancur, daulat negara pun porak poranda.

AS dan Uni Eropa Mulai Khawatir terhadap BRICS dan Kebangkitan Asia?

Beberapa waktu lalu memang beredar informasi bahwa Cina sedang dirangkul oleh Uni Eropa untuk bersama-sama menguasai perekonomian ASEAN melalui apa yang dinamakan "Europe's Smart



Asian Pivot". Menurut beberapa data yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, Asia sudah menjadi *trading partner* penting yang menguasai sepertiga perdagangan internasional Uni Eropa. Berarti ini sudah berhasil menyalip tingkat perdagangannya dengan Amerika Utara. Bahkan perdagangannya dengan Cina saja, sudah mencapai lebih dari 1 juta Euro per hari. Jelaslah ini merupakan catatan yang maha penting.

Sementara itu, negara-negara yang tergabung dalam BRICS menolak menjadi anggota TiSA. Penolakan negara-negara yang tergabung dalam skema BRICS untuk bergabung dengan TiSA bisa dibaca sebagai sebagai bukti bahwa BRICS sudah menjadi kekuatan keseimbangan baru di medan perekonomian global di luar lingkup pengaruh dan orbit dari TiSA dan TPP yang dimotori AS dan Uni Eropa.

Dalam konteks tren global terbaru inilah, pertemuan tingkat tinggi tiga negara (Korea Selatan, Cina dan Jepang) Minggu 1 November lalu, bisa dibaca sebagai suatu langkah strategis membangun kekuatan keseimbangan baru antar negara-negara Asia, untuk mengimbangi manuver Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui TPP dan TiSA.

Bagi Indonesia, menyikapi skema TPP yang dimotori oleh AS tersebut, hendaknya mewaspadai kata indah di balik frase "Free Trade" dan "More Transparency" dalam skema TPP. Sebab, "*Deal is not about trade, it is about corporate control.*"

Nampaknya memang begitulah adanya. Pertarungan Kepentingan antar Korporasi-Korporasi Global. Maka itu, Indonesia harus punya kontra skema untuk bisa ikut bermain secara aktif di tengah pusaran pertarungan antar korporasi global

tersebut.

Karena itu, Indonesia sudah saatnya untuk menyerap inspirasi dari Skema Kerjasama BRICS untuk membangun kekuatan-kekuatan baru sekaligus kekuatan penyeimbang dalam pertarungan global saat ini.

Sebagai pemimpin bangsa yang besar, sudah semestinya Presiden Jokowi berperan sebagai pelopor usaha dan kerja sama regional, dan bukan sebagai pengikut atau obyek pasif dari berbagai kepentingan global negara-negara adikuasa baik Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, maupun Cina.

Selain itu, Indonesia harus memelopori usaha untuk mengarahkan negara-negara anggota ASEAN dan Asia Timur untuk lebih fokus mengupayakan kerjasama ekonomi dalam kerangka kerjasama ASEAN, yang secara jelas dan terang-benderang tercantum dalam Piagam ASEAN dan menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Terkait dengan gagasan tersebut, pertemuan tingkat tinggi tiga negara (Jepang, Korea Selatan dan Cina) Minggu 1 November lalu, kiranya bisa kita jadikan momentum untuk memprakarsai lingkup kerjasama strategis bersifat multilateral yang lebih luas di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Tidak ada salahnya jika kita merujuk pada konsepsi Presiden Pertama RI Sukarno ketika melontarkan gagasan Pan Asianisme atau Pan Asia Raya, sebagai landasan untuk membangun kerjasama antar negara Asia atas dasar semangat The New Emerging Forces (NEFOS) yang dikembangkan Bung Karno pada 1964.

Sayangnya, gagasan Bung Karno untuk menggulirkan persekutuan strategis antar negara-negara yang baru merdeka dan berkembang yang rencananya akan diresmikan pada Conefo Agustus 1966, gagal terlaksana akibat meletusnya Gerakan 30 September 1965, yang berakibat lumpuhnya pemerintahan Sukarno sejak 1966. ◻ Hendrajit

Sepuluh Catatan Penting Buruknya TPP Bagi Indonesia



Dua hal yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan TPP. Pertama, ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka. Kedua, dengan penduduk sebanyak 250 juta orang, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Lalu, apakah Trans Pacific Partnership (TPP) itu?

Diambil dari jurnal Lemhanas edisi 16, Trans-Pacific Partnership atau disingkat TPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik, dengan Amerika Serikat (AS) sebagai motor utamanya. Perjanjian ini bersifat komprehensif, yang meliputi liberalisasi di semua sektor menyangkut barang, jasa dan investasi, dengan sifat terjadwal dan mengikat secara legal (*legally binding*). Isu-isu lain, yang biasa disebut isu "WTO Plus" yang dibahas dalam TPP adalah Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan

Intelektual (HAKI), kebijakan kompetisi (competition policy), belanja pemerintah (government procurement), dan fasilitasi perdagangan.

Kepemimpinan AS dalam TPP kemudian memaksakan agar aturan-aturan liberalisasi perdagangan dan investasi didalamnya disusun sesuai dengan standar dan kepentingan AS. Bahkan cakupan aturannya sangat luas dan komprehensif. Ada sebanyak 29 bab aturan yang dinegosiasikan yakni, Akses Pasar untuk Barang, Tekstil dan pakaian jadi, Bea Cukai, Fasilitasi Perdagangan, Sanitary dan Phitosanitary (karantina), Technical and barriers to trade (Labeling dan standar), Trade Remedies, Subsidi, Government Procurement, Investasi, Cross Border Services, Financial Services, Telekomunikasi, E-Commerce, Temporary Movement of natural persons, HaKI, Buruh, Lingkungan, Pembangunan, Trade Capacity Building, Competition, BUMN, Supply Chain, Transparansi, Regulatory Coherence, Initial

Provisions, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Exceptions dan Final Provision.

Menurut Research dan Monitoring Manager Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, sedikitnya ada 10 catatan pengalaman penting kenapa TPP akan buruk untuk Indonesia:

1. Hilangnya kontrol negara atas sektor publik.

TPP mendorong negara-negara untuk membuka sektor publiknya untuk dapat dimasuki oleh investasi asing, khususnya Amerika, hingga 100 persen. Segala bentuk daftar negatif investasi di sektor ini diminimalisasi. Tentu penguasaan sektor publik oleh korporasi akan berdampak terhadap hilangnya akses masyarakat terhadap sektor publik strategi secara murah, seperti air dan listrik.

2. Dominasi perusahaan asing dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

TPP mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diakses oleh perusahaan asing sehingga TPP mengatur tentang perlunya prinsip nondiskriminasi dan *national treatment* untuk perusahaan asing dalam kegiatan ini. Hal ini karena AS mengincar bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai triliunan dolar AS.

3. 'Memandulkan' BUMN bagi kepentingan nasional.

TPP hendak memastikan negara tidak memberikan banyak subsidi untuk BUMN sehingga korporasi asing bisa memenangkan kompetisi. Selama ini, BUMN dianggap telah memonopoli bisnis di level domestik melalui dukungan negara, baik dalam bentuk pinjaman yang murah, pengecualian pajak, maupun kemewahan untuk dapat mengecualikan sebuah undang-

undang. TPP akan menerapkan prinsip nondiskriminasi serta hukum kompetisi yang ketat bagi BUMN.

4. Hilangnya akses terhadap obat-obatan murah

Penerapan standar perlindungan paten dalam aturan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam TPP telah menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah. Hal ini karena TPP menghapus ketentuan fleksibilitas The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dalam WTO, yang selama ini digunakan banyak negara untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan oleh perusahaan farmasi Amerika demi kepentingan publik. Penghapusan ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP mengakibatkan monopoli obat-obatan oleh korporasi asing dengan harga mahal. Apalagi TPP menerapkan standar perlindungan lebih tinggi dari TRIPS di WTO, yakni dengan jaminan perlindungan paten lebih dari 20 tahun. Selain itu, TPP juga menerapkan eksklusivitas data yang telah dipatenkan.

5. Terancamnya kedaulatan pangan dan kedaulatan petani.

Masih terkait dengan penerapan standar perlindungan paten dalam aturan HKI pada TPP, sektor pertanian akan mengalami hal yang sama dengan sektor obat. Selama ini, perusahaan benih dan pestisida asing, seperti Bayer, Monsanto, maupun DuPont, telah memonopoli benih-benih ciptaannya. Karenanya, tidak memungkinkan petani kecil membudidayakan. Dengan jaminan perlindungan paten yang tinggi dalam TPP, korban-korban kasus kriminalisasi benih akan meningkat akibat diberlakukannya TPP.

6. Buruh terus tertindas.

TPP hendak melarang negara membuat regulasi yang melindungi buruh, bahkan tidak menginginkan adanya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin investor. Selain itu, arus bebas tenaga kerja asing untuk tenaga kerja

profesional juga menjadi salah satu agendanya.

7. UMKM tergilas.

Penghapusan tarif hingga batas serendah-rendahnya akan memudahkan produk AS dan negara industri lainnya masuk, ketimbang masuknya produk barang Indonesia ke sana. Apalagi standar akses pasar yang tinggi dalam TPP akan berpotensi menghilangkan kemampuan sektor usaha kecil Indonesia untuk dapat masuk ke pasar negara-negara TPP.

8. Defisit perdagangan.

Jika Indonesia bergabung dengan TPP, penghapusan hambatan tarif tidak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan kinerja perdagangannya, khususnya di tengah situasi pelemahan ekonomi global saat ini. Hal ini didukung dengan data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, 80 persen di antaranya terus mengalami kecenderungan negatif dari seluruh total perdagangan.

9. Impor undang-undang Amerika.

Aturan TPP hendak mengadopsi seluruh standar regulasi AS yang selama ini dipromosikan melalui OECD sebagai praktek terbaik dalam pengambilan keputusan. TPP mewajibkan negara melakukan review regulasi dalam rangka menilai kepatuhannya terhadap aturan-aturan TPP.

10. Indonesia digugat korporasi asing senilai triliunan dolar AS.

TPP memasukkan aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara Investor dan negara, atau dikenal dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Masuknya ISDS dalam TPP akan membuka peluang Indonesia digugat oleh investor senilai triliunan dolar AS di lembaga arbitrase internasional akibat mengganti ataupun mengubah regulasi nasionalnya yang dianggap merugikan kepentingan investor asing. Ancaman gugatan ini mengakibatkan Indonesia tersandera dan enggan membuat undang-undang yang melindungi kepentingan

rakyat.

Rektor Paramadina, Firmanzah mengemukakan TPP harus dikaji secara komperhensif lintas Kementrian, karena TPP tidak hanya bicara perdagangan barang dan jasa, namun TPP bersifat kompleksitas. Beberapa negara yang telah bergabung mempunyai motif yang berbeda, seperti Malaysia, sebelum bergabung ke TPP, produknya sudah *globally* dan memenuhi standar kualitas, karena Malaysia tidak mau hanya dijadikan pasar.

"Vietnam masuk TPP karena kepentingan Laut China selatan, namun Indonesia tidak memiliki konteks seperti itu," jelasnya.

Menurutnya, TPP berseberangan dengan Nawacita, terutama pada poin kedua mengenai tata kelola pemerintah, dan poin ke tujuh mengenai kemandirian ekonomi.

Pengamat ekonomi Indef, Enny Sri Hartati menjelaskan, bergabungnya Indonesia ke TPP maka sektor tekstil akan diuntungkan, mengingat ekspor dan impor dari Amerika tergolong cukup besar. Meski begitu, keuntungan dari sektor tekstil tersebut masih belum bisa dipastikan oleh pemerintah. Namun, di sisi lain jika masuk ke dalam TPP maka dampaknya pemerintah tidak dapat memproduksi obat-obat murah sehingga implikasinya terasa terhadap keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Lalu di sektor pertanian, pertanian Amerika Serikat dan Selandia Baru sudah cukup kompetitif dalam bersaing. Nah bagaimana kita melindungi petani-petani kita? Petani-petani kita siap tidak bertarung? Bertarung dengan negara-negara TPP," ujar dia.

Seharusnya pemerintah membuat kajian yang komperhensif dalam setiap memutuskan sesuatu dengan mendengar langsung dari pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan cara tersebut setidaknya pemerintah sudah mengetahui resikonya dan dapat meminimalisir resiko yang nantinya diterima. Ismed Eka



Pertemuan Islah Gatot-Erry, Rio Capella Untung

Tahun 2015 menjadi waktu dimana partai pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diterpa badai korupsi. PDIP, Nasdem, Hanura dapat dikatakan sebagai korban pertama yang masuk ke pusaran korupsi.

Khusus untuk Nasdem yang paling parah. Partai besutan Surya Paloh itu menyumbangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Patrice Rio Capella, untuk mengisi satu sel tahanan di Rutan KPK.

Rio adalah anggota Komisi III

DPR RI periode 2014-2019 pertama yang menjadi tersangka di lembaga antirasuah. Dia disangka menerima sejumlah hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, berupa uang Rp 200 juta. Sungguh nominal yang terbilang kecil untuk seorang Sekjen dari partai pengusung penguasa di negeri ini, begitu kata Surya paloh saat diperiksa KPK, meskipun tidak tersirat.

Bekas orang nomor dua di Partai

ANTARA



Mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella (kiri) berunding dengan para kuasa hukumnya usai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap penanganan perkara terkait dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11).

Teman mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Fransisca Insani Rahesti alias Sisca (kanan) berada di ruang tunggu gedung KPK sebelum menjalani pemeriksaan, Jakarta, Kamis (29/10).

situasi dan kondisi yang pastinya tidak pernah terpikirkan oleh seorang Rio. Didakwa telah menerima hadiah atau janji sejumlah uang Rp 200 juta.

Uang itu merupakan imbalan dari Gatot, lantaran Rio bersedia mengomunikasikan "pengamanan" kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Rangkaian suap-menyuap antara Rio dengan Gatot itu menjadi menarik jika dikaitkan dengan pertemuan islah di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta pada 19 Mei 2015. Pasalnya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik istri Gatot, Evy Susanti, disebutkan bahwa pertemuan islah tersebut bergulir, karena ketidakharmonisan hubungan antara Gatot dengan Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi.

Jadi, secara garis besar konstruksi kasus suap ke Rio berawal dari renggangnya hubungan antara Gatot dengan Erry, yang mengakibatkan bergulirnya penanganan kasus Dana Bansos, hingga terjadi pertemuan islah di DPP Nasdem, dan terakhir

peristiwa pemberian uang dari Gatot ke Rio. Jika ditelusuri latarbelakang politik semua pihak yang terlibat dalam alur tersebut, tertuju pada Partai Nasdem, kecuali Gatot yang berasal PKS.

Mari kita runut dari awal. Satu waktu usai pemeriksaan di KPK, Erry mengaku tidak pernah diberi tugas oleh Gatot selama dua tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumut. Ketua DPW Partai Nasdem Sumut itu juga menyinggu soal anggaran. "Masalahnya hanya pembagian tugasnya, tupoksi itu tidak berlangsung dengan baik. Saya tidak dikasih tugas apa-apa, di bidang anggaran, di bidang lain-lain, ini saya bersyukur juga," ujar Erry di gedung KPK, Jakarta, Senin 12 Oktober 2015.

Perseteraan antar keduanya pun diyakini meledak pada 2015. Secara mengejutkan, pada tahun pertama Jokowi memimpin, Kejagung mengambil alih kasus dugaan korupsi Dana Bansos, BDB, BOS, BDH dan penyertaan modal ke BUMD di Sumut. Kabarnya, kasus tersebut sengaja dilaporkan oleh Erry ke Kejaksaan Tinggi Sumut, sebelum akhirnya diambil alih oleh Kejagung.

Mulailah Kejagung di bawah pimpinan Muhammad Prasetyo memainkan peran. Langkah pertama adalah dengan melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap



Nasdem itu kini sudah merasakan hangatnya kursi menjadi terdakwa,

Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (kanan) bersama istrinya Evy Susanti (kiri) bersiap menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa kasus dugaan suap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/10).

Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Sabrina, sekitar akhir Maret 2015. Anehnya dalam surat panggilan tersebut, tertulis bahwa keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gatot. Padahal, kasus tersebut saat itu masih di tahap penyelidikan. Momen inilah diyakni menjadi titik awal "tali-kasih" antara Gatot dengan Rio.

Atas saran dari Yulius Irwansyah atau Iwan, pengacara dari kantor OC Kaligis and Associates, kemudian Gatot Pujo dan istrinya Evy memutar otak untuk bagaimana mendiskusikan perkara Bansos ini, agar namanya tetap aman di lemari besi Kejagung. Hingga tercetus lah nama Rio Capella. Jabatan Rio Capella sebagai Sekjen menggelapkan mata Gatot dan Evy, yang kemudian direalisasikan dengan sebuah pertemuan di Resto Jepang Edogin, Hotel Mulia Senayan, Jakarta sekitar awal April 2015.

Disana Gatot Pujo pun bercerita mengenai dugaan politisasi kasus Bansos Sumut oleh Erry. Seraya meyakinkan dugaan Gatot, mudal mulut, Rio juga mengiyakan jika Erry juga ia pandang sebelah mata. "Ya Wagub (Erry) itu kan orang bari di partai. Nggak bener Wagub nih," kata Rio. Perkataan seorang Sekjen yang diamini menghipnotis pola pikir Gatot.

Tak hanya itu, dengan manis Rio juga mengaku jika dirinya adalah kandidat Jaksa Agung, yang menjadi seteru Muhammad Prasetyo. Luluh hati Gatot mendengar pernyataan Rio. Seakan menyakinkan hatinya bahwa Rio-lah sosok yang tepat untuk menjadi pion menghadapi Jaksa Agung Prasetyo. Padahal, jika dilihat dari latarbelakang keduanya, pantas saja Jokowi menyetujui Prasetyo jadi Jaksa Agung, wong Prasetyo

pensiunan Jaksa, berbeda dengan Rio, seorang politikus kutu loncat.

Latar belakang itu sayangnya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Gatot. Mungkin, Gatot berpikir, lewat dirinya jalan Rio untuk menjadi Jaksa Agung bisa kembali terwujud. Rio pun akhirnya melontarkan kesediannya untuk mengkomunikasikan "pengamanan" nama Gatot dalam kasus Bansos ke Jaksa Agung.

Strategi Gatot berkomunikasi dengan Rio nampaknya dianggap kurang sempurna. Masalahnya, Gatot masih meminta bantuan ke OC Kaligis, saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai Nasdem, untuk mengislahkan dirinya dengan Erry melalui Surya Paloh. Seperti

yang sudah dibicarakan di awal, Gatot berada di lingkaran Nasdem, dan Erry dia anggap sebagai biang masalah.

Sebelum terjadi pertemuan islah, Rio sempat terganggu dengan pola komunikasi Gatot. Sampai akhirnya, dia meminta bantuan rekannya, Fransisca Insani Rahesti atau Sisca untuk berkomunikasi dengan pihak Gatot. Dalam suatu percakapan, Rio memerintahkan Sisca untuk memberi "kode" kepada Gatot. Maksudanya agar Rio bisa segera merealisasikan janjinya. "(Gatot) minta ketemu-ketemu terus, aku kan sibuk jadi harus menyisihkan waktu. Ketemu terus memangnya kegiatan sosial. Tetapi jangan sampai mereka pikir aku yang minta lho Sis," kata Rio ke Sisca.



Setelah hampir satu bulan Gatot dan Rio bersua, terjadilah pertemuan islah di kantor DPP Partai Nadem. Surya Paloh, Gatot, Erry, OC Kaligis dan Rio, berada dalam satu ruangan yang sama. "Kalau kalian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tidak harmonis, bagaimana kalian akan melaksanakan tugas roda pembangunan, yang rugi bukan kalian berdua tetapi masyarakat. Berikan kebanggaan sebagai putra daerah," papar Surya Paloh kepada Gatot dan Erry.

Pernyataan Surya Paloh pun bak menerangkan jalan ke Gatot bahwa obrolannya dengan Rio pantas direalisasikan. Namun demikian, bukannya Gatot justru Rio yang aktif "meminta" jatah. Melalui Sisca dan Iwan, Rio menyampaikan pesan permintaan sesuatu kepada Evy. Yang kemudian diartikan oleh istri kedua Gatot itu sebagai imbalan uang Rp 200 juta untuk Rio.

Tanpa berpikir panjang, Evy pun langsung menyiapkan uang tersebut, meskipun harus merogoh koceknya sendiri. Uang itu pun selanjutnya dititipkan Evy kepada Sisca saat keduanya bertemu di Cafe Betawi Mall Grand Indonesia, Jakarta pada 20 Mei 2015 pukul 13.00 WIB. Beberapa jam selang itu, Rio pun bertemu Sisca di Cafe Hotel Kartika Chandra Jl. Gatot Subroto Jakarta dan menerima uang sebesar Rp 200 juta dari Evy. Namun, Rio tak lupa membagi "komisi" Rp 50 juta kepada Sisca.

Tidak mau uang ratusan juta itu melayang sia-sia, Evy pun lantas mengatur agenda pertemuan dengan Rio. Entah apa pertimbangannya, pertemuan antara Evy dan Rio digelar di komplek Hotel Kartika Chandra, yakni di Planet Hollywood Cafe Hotel Kartika Chandra. Dalam pertemuan itu, lagi-lagi Rio pun melontarkan janji akan mengomunikasikan "pengamanan" perkara Bansos ke Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo.

Uang Oce untuk Maruli Hutagalung

Aliran uang haram nyatanya tidak berhenti sampai di Rio saja,

sebab terdapat fakta yang tak juga kalah mengejutkan. Istri Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti kembali memberikan pernyataan di depan penyidik KPK bahwa Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Maruli Hutagalung, ikut mencicipi uang rasuah untuk 'pengamanan' kasus dugaan korupsi dana Bansos milik Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2012-2013.

Sebagaimana tertera dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dimiliki Aktual.com, disebutkan bahwa terdapat uang senilai Rp500 juta yang masuk ke kantong Maruli. Uang itu, menurut Evi, mengalir melalui Mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem, OC Kaligis.

"Saya menyampaikan juga bahwa informasi dari OC Kaligis sudah diberikan yang Rp500 juta kepada Maruli sebagai JAMPidsus Kejaksaan karena terkait staf pemprov (Fuad Lubis dan Sabrina)," ujar Evi dalam BAP-nya.

Uang yang diduga masuk kantong Maruli itu bukanlah yang pertama. Berdasarkan informasi, demi kelancaran pengamanan kasus tersebut, Maruli disebut telah mengantongi uang rasuah hingga mencapai Rp8 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji memastikan bahwa pihaknya akan menelusuri dugaan aliran dana tersebut. Ia mengatakan, penyelidikan terhadap Maruli Hutagalung akan dilakukan setelah proses pengadilan terhadap Rio Capella Rampung.

"Nanti

(pengembangan akan dilakukan) kalau sudah ada putusan PRC," ujar Indriyanto, kepada Aktual.com.

Pengamat Kejaksaan, Kamilov Sagala, menilai atas dugaan tersebut sudah seharusnya pihak Kejagung, melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Widyopramono, memeriksa Maruli.

Sebab menurut dia jika tidak, maka penyidikan kasus bansos Sumut yang ditangani Kejagung akan menjadi bias.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Gubernur nonaktif Sumut, Gatot Pujo Nugroho dan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Eddy Sofyan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hibah dana bansos.

"Penyidikan kasus tersebut bias dan ada kesan konflik kepentingan," kata mantan komisioner Komisi Kejaksaan itu.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo meminta dugaan aliran uang tersebut untuk dibuktikan. "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanya saja, suruh buktikan," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (12/11).

Namun dirinya seraya memberikan ancaman kepada Evi jika dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan. "Kalau engga terbukti, nanti bisa dituntut balik itu sama Maruli," jelasnya. Sedangkan Maruli mengeluarkan nada tinggi ketika dikonfirmasi terkait masalah ini. "Ya semut saja diinjak melawan. Mikir dong. Selama saya di sini, 84 tersangka saya tahan. Enggak main-main saya, jadi wajarlah kalau ada yang seperti itu," ujar dia di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis (12/11). Maruli bahkan memberi peringatan kepada para wartawan yang mengkonfirmasi dugaan tersebut ke dirinya.

"You (wartawan) enggak boleh tulis-tulis sembarangan ya, tidak boleh menzolimi orang seperti itu. Punya buktinya enggak?," kata Maruli dengan nada tinggi. ◻



OC Kaligis

Nebby Mahbubirrahman-Mohammad Zaky Kusumo

Menhan: Bela Negara Bentuk Revolusi Mental



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa kesadaran bela negara itu penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai bentuk revolusi mental.

“Hal ini dilakukan sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh,” kata Menhan

di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Kamis (12/11).

Menurutnya, kesadaran bela negara yang diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan “soft power” bangsa.

“Bahkan akan memberikan ‘deterrence effect’ bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” kata Menhan.

Menhan menjelaskan, kesadaran bela negara pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran sikap, dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai bela negara.

“Antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik,” ucap Menhan.

Melalui bela negara, kata dia, diharapkan terbangun karakter disiplin, optimisme, kerja sama, dan kepemimpinan untuk turut serta menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. */Nebby-Ant*

Polri Tak Akan Catat Perolehan Suara di Pilkada

Kepolisian Republik Indonesia tidak akan mencatat hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini dilakukan, guna meminimalisir konflik perhitungan suara.

Demikian disampaikan, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, ketika Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, di Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

“Mabes Polri tidak akan mencatat hasil Pilkada, karena kalau kita catat nanti hasilnya dicurigai dan jika tidak sama dengan hasil (rekapitulasi) KPU ini menjadi problem tersendiri,” ujar Kapolri.

Oleh karenanya, menurut Kapolri, pihaknya akan terfokus pada kegiatan

keamanan.

Ia mengatakan, jelang masa kampanye Polri akan mengerahkan separuh dari total kekuatan yang ada guna mengamankan pilkada serentak.

“Polri tidak sendiri, namun ada juga bantuan dari pihak TNI dan kami dibantu Satpol PP,” kata Badrodin.

Lebih jauh Kapolri menyatakan bahwa telah memetakan potensi konflik di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai cara. Salah satunya, dengan mempelajari sejarah konflik di suatu daerah, hingga mengantisipasi potensi-potensi yang dapat memicu konflik.

“Mana kala terjadi gejala di satu polres maka akan di-‘back-up’ dari polres tetangganya atau dari polda,” jelas dia. */Nebby-Ant*

Kapolri: 50 Tersangka Kasus Karhutlah Telah Dilimpahkan ke Kejaksaan

Sebanyak 50 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilimpahkan ke kejaksaan, atau sudah masuk pada tahap dua.

“Sudah ada yang masuk tahap dua, kalau tidak salah sudah 50 (tersangka) kasus,” ujar Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/11).

Selain itu, Badrodin juga menambahkan ada 10 berkas kebakaran hutan yang saat ini telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh jaksa.

“Yang sudah P21 itu ada 10, proses hukum kasus kebakaran hutan ini sedang berjalan,” katanya.

Sebelumnya, hingga akhir Oktober 2015 Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan dari 263 kasus karhutla yang dilaporkan kepada polri, sebanyak 80 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kebakaran di Sumatera dan Kalimantan itu.

Dengan adanya perkara ini, para tersangka dapat dijerat dengan Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta terancam mendapat hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 3 miliar dan maksimal Rp 10 miliar. */Wisnu-Ant*



Hikmahanto: Tak Ada Urgensi dan Banyak Ruginya RI Gabung TPP

Rencana pemerintah Indonesia untuk bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP) terus menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menduga jika hal itu dilakukan untuk menghindari pandangan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang condong ke China. Sebab sudah beberapa kali Indonesia lebih intens dalam melakukan kerjasama internasionalnya dengan pemerintah China.

Maka dari itu, untuk menghilangkan kecurigaan, Presiden Joko Widodo kemudian mengimbangnya dengan rencana untuk bergabung di TPP tersebut.

“Makanya condong ke Amerika Serikat itu supaya kita netral dan menjalankan politik bebas aktif.



Makanya pernyataan Presiden tersebut intens bertanya mengenai ketertarikan dalam TPP,” kata Hikmahanto kepada wartawan, Jakarta, Selasa (3/11).

Hikmahanto menilai bahwa tidak ada urgensi yang mengharuskan Indonesia bergabung dalam TPP, sebab sejak awal Indonesia tidak masuk di dalam proses negosiasi perjanjian, sehingga Indonesia tidak memiliki posisi tawar terhadap perjanjian tersebut.

“Jika perjanjian tersebut diikuti

oleh Indonesia, maka konsekuensinya yaitu banyaknya peraturan Indonesia yang harus dirubah, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam TPP,” sebutnya.

Selain itu, jika pemerintah Indonesia mengikuti isi perjanjian TPP maka tidak akan ada lagi keistimewaan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara. Padahal menurut pasal 33 UUD 1945, keistimewaan tersebut sering kali diberikan kepada BUMN. Kemudian, dengan masuknya Indonesia dalam TPP akan berdampak kepada pasar Indonesia yang akan dieksploitasi.

“Jadi menurut saya sebaiknya memang Indonesia tidak masuk TPP ini. Apalagi kita akan masuk ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini (MEA) saja belum pasti kesiapan Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap MEA,” jelas dia.

“Menurut saya lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya,” tutupnya.

/Arbie Marwan-Dhanu Akbar

Dari BNN, Polisi dan TNI, Terlibat Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengaku kekhawatir mengenai kondisi peredaran narkoba di Indonesia. Sebab, Indonesia saat ini sudah darurat narkoba, bahkan banyak orang yang sudah terlibat dengan sindikat barang haram itu. Baik di lembaganya hingga TNI.

“Di BNN ada, di polisi ada, di TNI juga ada,” kata Budi saat berpidato dalam sarasehan di Mapolresta Medan, Selasa (10/11).

Mantan Kabareskrim itu menyebutkan, ada kepentingan asing ingin menghancurkan Indonesia terkait penyelundupan narkoba ini. Karena, ada pihak-pihak yang diduga membiarkan narkoba dalam jumlah besar masuk ke Indonesia.

“Kita tahu narkoba ini paling banyak dari Cina, Taiwan, Nigeria, ada juga Iran. Dari sana terlihat adanya kepentingan negara luar yang menginginkan kehancuran Indonesia.

Karena? Karena mereka mengeksport ke sini, di sini tujuannya. Ini yang nanti harus didalami Lemhanas, TNI, dan dari BIN,” kata Budi.

Dia mengatakan, sebagian kecil pengiriman narkoba itu sudah mereka kuntit. Namun, sebagian besar masih menunggu kelengahan aparat Indonesia buat masuk dari pelabuhan-pelabuhan kecil.

Menurut dia, ada ratusan ton narkoba menunggu diselundupkan ke negeri ini. “Kita sudah kirim anggota ke Tiongkok dan Taiwan. Kita tahu ada ratusan ton narkoba yang dikapalkan ke wilayah ini,” lanjut Budi.

Kondisi ini menurut dia sangat mengkhawatirkan. Sebab narkoba membuat kerusakan permanen pada orang yang terkena. Para pengedar pun akan terus mencari generasi baru pengguna narkoba.

Dia mengatakan, guna mengatasi peredaran narkoba semua elemen masyarakat harus saling membantu.

“Bukan hanya penindakan, kita juga harus melakukan pencegahan,” ujar Budi. */Wisnu*





Jadi Poros Ekonomi Syariah Internasional, Bank Indonesia Gelar ISEF 2015

Bank Indonesia pada akhir bulan lalu menggelar Festival Ekonomi Syariah Indonesia ke-2 atau Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2015. Even yang rutin digelar setiap akhir tahun oleh BI di Kota Surabaya Jawa Timur ini, bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi sistem keuangan syariah dalam pengembangan sektor riil.

Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Mirza Adityaswara saat meresmikan ISEF 2015 menuturkan, bahwa ISEF tahun ini mengangkat tema *Empowering Islamic Economic and Finance for the Prosperity of the Nations* (Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Kesejahteraan Bangsa).

“Diharapkan dapat menunjukkan peran aktif Indonesia sebagai poros pengembangan ekonomi syariah di

dunia Internasional,” kata Mirza akhir bulan lalu.

Adapun rangkaian acara ISEF 2015 yang digelar mulai 27 Oktober sampai 1 November 2015 ini kata Mirza meliputi Pembukaan, Forum Ekonomi Syariah, dan Pameran Syariah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam pembukaan kegiatan edukasi keuangan syariah bagi pengusaha di Surabaya mengatakan Bank Indonesia menawarkan empat langkah dalam percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Langkah pertama kata Perry adalah regulasi dan kebijakan yang mendukung keuangan dan ekonomi syariah. Kedua, peningkatan pengetahuan mengenai ekonomi dan keuangan syariah bagi perbankan, pelaku usaha dan sektor keuangan.

Mirza Adityaswara saat meresmikan ISEF 2015, di Surabaya (29/10).

“Ketiga, penyediaan model-model pembiayaan ekonomi dan keuangan syariah. Keempat, penyelenggaraan inisiatif-inisiatif internasional seperti *core principles* zakat dan wakaf yang akan diluncurkan tahun ini,” kata Perry.

Penyelenggaraan kegiatan edukasi ini lanjut Perry merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, mengingat potensi besar yang dimiliki keuangan syariah sebagai sumber pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Jawa Timur, yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi serta



Foto atas: Perry Warjiyo, dalam pembukaan kegiatan edukasi keuangan syariah bagi pengusaha di Surabaya (28/10).

Foto bawah: Pakar ekonomi Islam Syafi'i Antonio, Ketua Umum ASBISINDO Jawa Timur, Erysyam Fansuri, Ketua Bisnis Muslim Indonesia, Misbachul Huda dalam diskusi Edukasi Keuangan Syariah untuk Pengusaha yang berlangsung di Surabaya (20/10).



semata milik umat Islam, melainkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Model bisnis ekonomi dan keuangan syariah yang berbasis komunitas merupakan model bisnis yang tepat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk untuk menangkul penetrasi UMKM dari luar yang semakin besar dengan adanya liberasisasi ASEAN.

Edukasi kepada pengusaha diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan ketertarikan pengusaha terhadap skema keuangan syariah. Selanjutnya, dengan memanfaatkan jaringan usaha yang dimiliki oleh pengusaha, maka berbagai kontribusi dapat diberikan oleh pengusaha dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebutkan wilayahnya siap menjadi percontohan atau "pilot project" ekonomi syariah di Indonesia, sebab ada sekitar 6.000 pondok pesantren di wilayah setempat.

"Kultur di Jatim sangat kuat, dan saya mengusulkan ke Bank Indonesia agar Jatim jadi pilot project keuangan syariah di Indonesia," ucap Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde saat pembukaan "Indonesia Sharia Economic Festival" (ISEF) ke-2 di Lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya.

Ia beralasan, Jatim memiliki modal dasar yang kuat mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah, karena sekitar 90 persen warganya beragama Islam, sehingga sangat layak menjadi basis ekonomi Syariah. ● Arbie Marwan

36,65 juta pemeluk Islam, merupakan wilayah yang ideal sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," tambahnya.

Untuk itulah, edukasi kepada sekitar 150 pengusaha Jawa Timur ini menjadi sangat penting.

Turut memberi sambutan dalam pembukaan acara adalah Kepala Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sukanto, yang membahas mengenai dukungan OJK dalam pengembangan ekonomi syariah, dari sisi regulasi.

Sementara para narasumber adalah pakar ekonomi Islam, Syafi'i Antonio, Ketua Umum ASBISINDO Jawa Timur, Erysyam Fansuri, Ketua Bisnis Muslim Indonesia, Misbachul Huda.

Sesuai dengan kompetensi masing-masing, para pembicara

mengupas mengenai produk, layanan, nilai, dan prinsip operasional keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha.

Edukasi keuangan syariah kepada pengusaha ini bertujuan agar para pengusaha mengetahui berbagai jenis produk dan atau skema terbaik yang telah dimiliki oleh perbankan syariah, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dana.

Selain itu, edukasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya kerjasama/ kemitraan dengan usaha berskala mikro, kecil dan menengah dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang.

Para pengusaha juga diharapkan akan memiliki wawasan yang lebih luas, bahwa ekonomi syariah bukan

Perkembangan Ekonomi dan Potensi Sulut di tengah Perlambatan Ekonomi Global

Salah satu indikator tingkat ekonomi suatu bangsa dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. PDB dapat dihitung melalui pendekatan pengeluaran dengan rumus $Y = C + I + G + NX$. PDB merupakan penjumlahan konsumsi (C), Investasi (I), Pembelian Pemerintah (G), Ekspor Bersih (NX).

Ada tiga fakta terkait fluktuasi ekonomi, pertama fluktuasi tidak tetap dan tidak dapat diprediksi. Kedua, umumnya fluktuasi variable ekonomi bergerak bersamaan. Ketiga, ketika PDB jatuh, pengangguran bakal meningkat.

Sejak 2011 pertumbuhan ekonomi terus melambat atau memasuki fase deselerasi. Namun, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat pada kuartal ke-III 2015. Peningkatan tersebut ditandai dengan meningkatnya konsumsi Rumah Tangga dan investasi yang terlihat dari penjualan semen.

Ekonom dari Bank Danamon, Dian Ayu Yustina mengungkapkan bahwa data Bank Indonesia sangat diperlukan untuk menganalisa Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Hasil analisis PDB dan Inflasi akan berpengaruh terhadap kebijakan Dewan Direktur (BoD), Dewan Manajemen (BoM), Dewan Komisaris (BoC), Stakeholders, Nasabah, Klien dan Media.

Sedangkan data Inflasi diperlukan untuk mengetahui meningkatnya harga secara umum dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Dengan data Inflasi tersebut kita dapat melihat penurunan daya beli, tingkat kesenjangan, pengaruhnya terhadap investasi produktif dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Berdasarkan data Badan Pusat



Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada bulan Oktober 2015, inflasi di Manado tercatat sebesar 1,49% (month-on-month/mtm) tertinggi di Indonesia. Padahal secara nasional, BPS justru mencatat deflasi sebesar 0,08% (mtm).

"Di tengah laporan data BPS yang secara nasional mengalami deflasi, Sulawesi Utara justru mengalami Inflasi tertinggi se-Indonesia. Inflasi tersebut didorong harga pangan, terutama cabai dan tomat," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Utara, Peter Jacobs.

Kenaikan harga cabai dan tomat tersebut karena faktor budaya yang ada di masyarakat Manado. Mereka gemar akan makanan pedas sehingga berapa pun harga cabai, mereka tetap membutuhkannya sebagai komponen pokok makanan.

Secara umum, struktur ekonomi Sulut didominasi sektor pertanian, sedangkan dari sisi permintaan, pangsa terbesar didominasi konsumsi swasta. Perkembangan ekonomi pada triwulan III 2015 menunjukkan sedikit peningkatan dan tingkat pertumbuhan di atas nasional. Dari sisi permintaan, peningkatan didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan peningkatan

investasi, namun kontraksi masih menahan laju pertumbuhan.

Pada kuartal II 2015, konsumsi rumah tangga meningkat dari 6,04 persen menjadi 7,26 persen pada kuartal III 2015. Selain itu, konsumsi pemerintah meningkat dari 8,32 persen pada kuartal II 2015 menjadi 10,46 persen pada kuartal III 2015. Investasi meningkat dari kuartal II 2015 dari 6,14 persen menjadi 10,41 persen pada kuartal 3 2015.

Perkembangan ekonomi dari sisi penawaran, mencolok terlihat dari sektor konstruksi dari 6,8 persen pada kuartal II 2015 menjadi 10,75 persen pada kuartal III 2015.

"Pada triwulan IV 2015, perekonomian Sulut diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 6,4 - 6,6 (yoy). Kondisi ini didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan optimalisasi serapan anggaran pemerintah terutama di sisi belanja modal," ujar Peter Jacobs.

Kondisi infrastruktur pendukung di Sulawesi Utara masih relatif lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Hal ini tercermin dari rasio elektrifikasi yang mencapai 86,89% lebih tinggi dibandingkan rasio elektrifikasi provinsi lain di wilayah Sulutenggo. Disisi lain, kondisi jalan juga tergolong baik, dengan rasio kemantapan jalan yang kondisinya tergolong mantap mencapai 86,37%.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulut, hilirisasi industri di Sulut perlu didorong untuk meningkatkan kinerja ekspor. Selain itu, posisi Sulut di bibir Pasifik perlu terus dioptimalkan dengan membangun industri baru meskipun dengan bahan dasar yang berasal dari daerah lain.

"Penanganan masalah pariwisata khususnya terkait ekosistem seperti permasalahan sampah dan air bersih perlu segera ditindaklanjuti oleh semua pihak. Pembangunan TPA di Bunaken dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pariwisata di Sulawesi Utara. Realisasi pembangunan proyek perlu diberikan perhatian khusus," pungkasnya. Antara



Foto atas: Yusri Usman

Foto kiri: Menteri ESDM Sudirman Said akhirnya memenuhi panggilan penyidik KPK, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Batasi Audit PETRAL, Sudirman Said Sembunyikan Banyak Fakta

Pengamat kebijakan energi Yusri Usman menilai pembatasan periode audit forensik Pertamina Energy Trading-Pertamina Energy Service (PETRAL-PES) sejak awal 2012 hingga 2015 dinilai janggal dan terkesan memojokkan pihak tertentu. PT Pertamina dinilai telah menyelamatkan sebagian mafia minyak dan gas (migas) yang dilakukan di masa lalu, terutama sebelum tahun 2012. Pasalnya, tender pengadaan minyak mentah dan BBM sudah mulai dilakukan sejak 2004 silam.

"Sangat aneh audit forensik hanya dilakukan setelah 2012. Audit forensik hanya dijadikan alat untuk menyelamatkan sebagian mafia migas. Sewajarnya audit forensik harus dilakukan mulai tahun 2004 sampai 2014. Lebih difokuskan sebelum dan setelah ISC-Pertamina dibentuk. Agar semua kelihatan terang-benderang," ujar Yusri di Jakarta.

Selain periode yang terlalu singkat, lanjutnya, Pertamina juga seharusnya melakukan audit Integrated Supply Chain (ISC) yang berperan dalam menentukan pemenang tender. Sejak ISC dibentuk pada september 2008, semua fungsi perencanaan, perintah tender, pembuat *owner estimate* dan pengevaluasian usulan tender dari PETRAL-PES dan pemutus siapa

pemenang ada di ISC. Itu proses bisnisnya antara PETRAL-PES dengan ISC.

"Kerangka proses bisnisnya PETRAL-PES dengan ISC-Pertamina terlihat kesalahan paling besar terletak ada di ISC, bukan di PETRAL-PES. Artinya kalau ada pihak ke-3 tentu mereka mengendalikan direksi Pertamina dan ISC karena Petral-PES tidak punya wewenang pemutus. Kecuali ISC tidak ada, maka Direktorat Pengolahan yang mengorder langsung minyak mentah ke PES. Sedangkan produk BBM Direktorat Pemasaran dan Niaga order langsung ke Petral-PES. Ini kontruksi bisnis sebelum ISC dibentuk pada September 2008," jelasnya.

"Menteri ESDM Sudirman Said pernah menjabat sebagai kepalaanya dan akhirnya dicopot pada 2009. Apalagi dikatakan bahwa Sudirman kena sengat 'belut racun' di kolam oli (Petral). Bisa jadi ini dendam lama waktu Sudirman menjadi SVP ISC. Jadi logikanya aneh kan kalau audit forensik terhadap Petral hanya dilakukan pada 2012 sampai 2015. Ada yang ditutupi," jelas Yusri.

Sudah seharusnya Menteri Sudirman menjadi orang yang *gentlemen* dan *fair* dengan melakukan audit forensik mulai dari 2008.

"Kalau Menteri Sudirman jujur dan tidak ingin menimbulkan fitnah, maka Sudirman seharusnya minta audit forensik dilakukan mulai periode transisi ISC dibentuk 2009 sampai 2014," pungkasnya.

Sebagai informasi berdasarkan data yang diperoleh, diduga Sudirman Said sewaktu menjabat VP Integrated Supply Chain (ISC), pada tahun 2009 dalam beberapa pengadaan (Minyak Mentah dan BBM) melakukan inefisiensi bahkan cenderung *mark up* dan merugikan Pertamina.

Sudirman Said melakukan pembelian (Minyak Mentah dan BBM) dengan harga alfa (diluar MOPS) tertinggi hingga US\$6,50/barel. Padahal pembelian sebelumnya tidak pernah mencapai angka setinggi itu (rata-rata US\$3/barel). Sampai akhirnya ISC era Sudirman Said dilikuidasi (Maret 2009), dan harga alfa (dilluar MOPS) kembali ke angka kisaran US\$3/barel.

Hal ini diketahui dalam beberapa Purchasing Order (PO) nomor 121/TOO300/2009-SO, tanggal 21 Januari 2009, Nilai alfa (diluar MOPS) US\$6,50/barel, No PO 116/TOO300/2009-SO, nilai alfa (diluar MOPS) US\$5,70/barel tertanggal 20 Januari 2009 dan PO 113/TOO300/2009-SO tertanggal 20 Januari 2009, seharga alfa (Diluar MOPS) US\$5,95/barel. Semua dokumen tersebut ditandatangani oleh VP Procurement, Sales dan Market Analysis, Daniel Purba. Saat ini Daniel Purba pun menjabat sebagai VP ISC Pertamina. • Ismed Eka

Jaga Stok Pangan, Pemerintah Mulai Impor Beras



Pemerintah Republik Indonesia mulai menerima pengiriman beras impor di sejumlah daerah di Indonesia untuk menjaga stok pangan akibat gejala cuaca El Nino yang memicu kekeringan di sejumlah tempat.

“Sudah (beras impor masuk). Ada di banyak pelabuhan, bukan hanya Jakarta,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (11/11).

Menurut JK, pelaksanaan impor

beras dilakukan untuk memenuhi persediaan stok beras di beberapa daerah di Indonesia akibat panen yang mundur karena kekeringan.

Menurut data Bulog, sejumlah daerah telah menerima beras luar negeri untuk persediaan.

“Yang paling penting pemerintah menyiapkan cadangan (beras) nasional yang cukup. Nah termasuk dari impor tidak apa-apa,” kata JK.

Kekeringan pada Agustus hingga

November 2015 memicu mundurnya masa panen gabah sehingga persediaan beras untuk tahun depan berkurang.

“Demi rakyat, bukan demi hanya satu orang untuk menjaga citra, tidak. Demi menjaga jangan harga beras naik,” tegas JK.

Sebelumnya pada Rabu (4/11), sebanyak 4.800 ton beras asal Vietnam tiba di Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala Perum Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut) Sabaruddin Amrulla mengatakan impor beras dilakukan untuk menjaga stok pangan di provinsinya yang mulai minim.

Sabaruddin mengatakan impor beras dilakukan bagi daerah yang bukan merupakan daerah surplus beras dan stok pangannya menipis.

Sementara itu pada Minggu (8/11), Bulog Merauke berencana mendatangkan beras impor dari Vietnam karena persediaan menipis akibat petani yang tidak mampu memenuhi kebutuhan.

“Untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah sub Divre Merauke maka harus didatangkan dari luar sebanyak 3.000 ton,” kata Kepala Bulog Sub Divre Merauke Zulkarnaen Nurdin. /Karel Stefanus Ratulangi-Ant

Penguasaan Suatu Negara Tidak Lagi Menggunakan Senjata

Presiden Forum Sinergi Serikat Pekerja/Serikat Karyawan BUMN Peduli Bangsa (FSPPB), Eko Wahyu Laksmono mengatakan bahwa untuk membangkitkan kesadaran menggunakan produksi Nasional, Pekerja /Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen meningkatkan eskalasi dan kelanggengan semangat sinergi BUMN. Sinergi BUMN yang berjumlah 119 dengan aset hingga Rp4.500 triliun memiliki potensi daya konstruktif yang sangat besar untuk membangun negeri.

“Peta penguasaan suatu negara oleh negara lain dan model kolonialisme telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi secara terang-terangan menggunakan

senjata, tetapi melalui perpanjangan tangan korporasi yang masuk ke negara-negara berkembang yang dilegalkan dengan kebijakan, peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada kepentingan pengembangan dan kemajuan BUMN,” ujar Eko Wahyu Laksmono di Jakarta, Rabu (11/11).

Atas dasar kepedulian terhadap penyelamatan perusahaan milik negara, FSPPB mendesak agar pemerintah wajib memastikan pelaksanaan peraturan tentang sinergi antar BUMN dan memonitoring implementasinya secara komprehensif dan konsisten melibatkan stakeholder, untuk mewujudkan Indonesia Incorporated.

“Pemerintah dan DPR harus membuat Undang-Undang yang mewajibkan pengelolaan seluruh sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola BUMN, termasuk yang habis masa berlakunya diserahkan tanpa syarat kepada BUMN,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, seluruh Pekerja/Karyawan BUMN yang tergabung dalam FSPPB berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kelangsungan bisnis perusahaan BUMN demi terciptanya kemandirian dan kedaulatan nasional.

“Kementerian BUMN terutama menteri Rini Soemarno sudah harus membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pengembangan dan kemajuan BUMN,” tegasnya. /Ismed

PMN Ditangguhkan, Menteri Rini Instruksikan BUMN "Right Issue"



Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong sejumlah perusahaan milik negara untuk melakukan penawaran saham kembali (right issue) sebagai skema pencarian dana menyusul kemungkinan penangguhan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun anggaran 2016, sekitar Rp40,42 triliun kepada 26 BUMN.

"Kita memiliki beberapa opsi. Jika BUMN yang bersangkutan itu perusahaan publik kita dorong melakukan "right issue" (penerbitan kembali saham baru)," kata Rini, di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut Rini, "right issue"

akan diinstruksikan kepada BUMN Terbuka yang sahamnya sudah dicatatkan di pasar modal (IPO). "Kami dorong menempuh "right issue" meskipun saham pemerintah terdilusi," ujarnya.

Masalahnya apakah kemudian dalam merealisasikan right issue itu harus persetujuan DPR?

Menurut catatan, pada Jumat (30/10), DPR-RI dalam Rapat Paripurna mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi Undang-undang APBN 2016. Namun dalam pengesahan tersebut, DPR mengisyaratkan penundaan persetujuan suntikan dana kepada 26 BUMN dengan total nilai Rp40,42 triliun.

Selain "right issue" ditambahkan Rini, BUMN juga diarahkan untuk melakukan revaluasi aset, opsi yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencari pinjaman.

"Memang tidak ada dana tunai yang masuk, tetapi tingkat leveraging

perusahaan dapat meningkat berkali lipat," ujarnya.

Pada tahun anggaran 2016 ini kan PMN tidak menjadi bagian yang tidak disetujui, berartikan sekarang belum dibicarakan mendalam lagi.

"Untuk itu akan dibicarakan kembali dengan Menteri Keuangan dan Presiden Jokowi. Apakah memang akan ada APBN Perubahan atau BUMN harus mulai melihat kemungkinan lain dalam pembiayaan agar tetap bisa melaksanakan pembangunan terutama infrastruktur," tegas Rini.

Tidak hanya itu tambahnya, pemerintah masih belum mengetahui apakah akan melakukan PMN kembali melalui APBNP 2016.

"Opsi pengajuan APBNP tersebut masih terbuka untuk dilakukan. BUMN ini kan sebagai badan usaha yang tentunya harus selalu memikirkan sebagaimana tugas yang diemban agar terus berkembang dan melakukan aktifitas yang memberikan nilai tambah kepada negara, kepada para karyawan," kata Rini. /Ismed-Ant

BKPM Targetkan 2016 Realisasi Investasi Capai Rp600 Triliun

Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan realisasi investasi pada 2016 menembus Rp600 triliun atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan 2015.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea di Surabaya, Selasa (10/11) mengatakan, pada 2015, pihaknya optimistis melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp519,5 triliun.

"Untuk tahun depan, kami targetkan bisa Rp600 triliun," katanya.

Menurut dia, sampai triwulan ketiga 2015, realisasi investasi mencapai Rp400 triliun atau naik 16,7 persen dari periode yang sama 2014 sebesar Rp342 triliun.

Realisasi investasi sepanjang

Januari-September 2015 itu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.059.734 orang atau naik 10,4 persen dibandingkan periode yang sama 2014 sebesar 960.336 orang.

Tamba juga mengatakan, realisasi investasi periode Januari-September 2015 tersebut sudah mencapai 77 persen dari target Rp519,5 triliun.

Artinya, BKPM tinggal mengupayakan kekurangannya sebesar 23 persen untuk memenuhi target realisasi investasi 2015.

"Namun, kami optimistis bisa memperoleh 25 persen selama triwulan terakhir tahun ini atau dua persen lebih tinggi dibandingkan target 23 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BKPM Franky Sibarani optimistis prospek investasi Indonesia ke depan akan lebih baik.

Menurut dia, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang memberikan

kemudahan pada investor.

BKPM, lanjutnya, juga mulai melaksanakan layanan izin investasi tiga jam ditambah dengan layanan "blocking" tanah tiga jam sejak 26 Oktober 2015.

Izin investasi tiga jam merupakan terobosan BKPM untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.

Layanan investasi tiga jam adalah pemberian izin prinsip dengan kriteria tertentu yang diproses dalam satu paket dengan penerbitan akta pendirian perusahaan dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, serta informasi ketersediaan tanah (blocking tanah) dalam waktu tiga jam.

Kriteria investasi yang dapat memanfaatkan layanan tersebut adalah bernilai minimal Rp100 miliar dan atau menggunakan tenaga kerja Indonesia di atas 1.000 orang.

/Arbie Marwan-Ant

Menguji Nyali dan Prospek di Pasar Irak

Wartawan Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan kunjungan jurnalistik di Irak, bertepatan dengan pameran perdagangan internasional di Baghdad, 1-10 November 2015. Berikut laporannya tentang upaya pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke pasar, di negara yang "rawan dan berbahaya" tersebut.

Jika mendengar kata "Baghdad" atau "Irak," yang terbayang di kepala adalah negara yang selalu ricuh, jadi ajang konflik bersenjata, sering jadi sasaran serangan bom, bahkan ada ancaman nyata dari kelompok ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah). Gambaran itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi belum lengkap. Hal ini karena Irak selain tempat berisiko, ia adalah juga sebuah negeri yang penuh peluang dan prospek menarik untuk bisnis.

Nah, itulah sebabnya mengapa sejumlah 11 pelaku usaha kelas UKM (usaha kecil dan menengah) Indonesia, yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, pada November ini membesarkan nyali untuk datang ke Baghdad. Mereka mengikuti ajakan dari Kedutaan Besar RI di Baghdad, untuk mengikuti pameran perdagangan internasional, Baghdad International Fair 2015, di ibukota Irak tersebut. Dari segi level bisnis, mereka memang pengusaha kecil, tetapi punya semangat besar untuk merintis pasar di Irak, tempat yang tampak belum populer.

Duta Besar Indonesia untuk Irak, Safzen Noerdin sejak 2012 sudah memulai tradisi yang bermanfaat bagi peningkatan ekspor Indonesia ke Irak. Safzen mengajak para pelaku usaha di Indonesia, termasuk UKM, untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan internasional, yang diadakan setiap tahun di Baghdad. Hal itu dijelaskan Koordinator Fungsi Politik dan Ekonomi KBRI Baghdad, S. Ari Wardhana, kepada wartawan

Aktual.

Selain menghadirkan pengusaha Indonesia ke Irak, untuk setiap pameran perdagangan yang berlangsung di Indonesia, KBRI Baghdad juga selalu mengusahakan partisipasi dari para pengusaha Irak. Ini berlangsung sejak Trade Expo di Indonesia tahun 2012, yang dihadiri sejumlah pengusaha Irak. "Saya pikir ini sudah menjadi satu indikator yang baik, positif, untuk membuat ini jadi suatu tradisi. Menghadirkan pengusaha Irak ke Indonesia, karena kita tahu mereka adalah buyers. Kita sebagai produsen di situ melihat kapasitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Irak," jelas Ari Wardhana.

Ancaman Aksi Militer ISIS

Di satu sisi, pada 2012 Indonesia sudah ikut di Baghdad International Fair. Demikian juga pada 2013 dan 2014, Indonesia ikut dengan segala keterbatasan, karena situasi politik dan keamanan yang rawan di Baghdad saat itu. Yakni, adanya aksi militer ISIS, yang berhasil merebut wilayah yang cukup luas di Irak.

"Di saat-saat Pak Dubes dan teman-teman mempersiapkan proses evakuasi KBRI Baghdad (karena ancaman ISIS), kita juga bisa menghadirkan --meski sangat minimal-- pelaku usaha dari Indonesia. Jadi saya pikir ini sudah membangun mekanisme untuk saling tahu antara kedua pengusaha. Bagaimana bisa meningkatkan ekspor, jika kita tidak membangun mekanisme seperti ini," lanjut Ari. Target yang ingin dicapai lewat partisipasi di berbagai



pameran perdagangan itu adalah meningkatkan neraca perdagangan itu hingga sampai memberi surplus yang signifikan bagi Indonesia.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bismark, "Kehadiran kami di pameran ini lebih bersifat untuk memperkenalkan produk-produk Jawa Barat. Sehingga jika situasi di Irak nanti membaik, mereka sudah tahu dan mengenal produk-produk kami."

Pengusaha asal Bandung memamerkan busana Muslim dan busana biasa, kopi, teh, obat-obatan herbal, produk-produk kecantikan alamiah, suplemen makanan, produk perawatan bayi, gula kelapa, aneka ragam bumbu masak, sambal, dan lain-lain. Dalam pameran, sejumlah warga Irak menunjukkan minatnya



Stand Indonesia di pameran perdagangan Baghdad.

pada produk-produk busana, yang dijual cukup murah. Sebuah celana jeans dihargai Rp 165.000 atau sekitar 10 USD, harga yang lumayan murah untuk ukuran Irak.

Pasar di Irak sebenarnya sangat luas karena Irak bisa dibilang hanya menghasilkan minyak bumi, namun produk-produk lain harus diimpor dari luar. Negara lain yang tampil agresif memasarkan produk-produknya di pameran perdagangan ini adalah Jepang dan Iran, yang menyewa satu balairung tersendiri untuk perwakilan dagangnya.

Merasa Yakin Bisa Bersaing

Sesudah empat hari mengikuti pameran dagang di Baghdad dan melihat kebutuhan pasar Irak, ternyata pelaku usaha Indonesia yakin bisa memenuhinya. Produk Indonesia, khususnya asal Jawa Barat, bisa bersaing dengan produk

negara lain, seperti misalnya produk Iran dan Mesir. “Secara kualitas, perbedaannya jauh sekali. Kalau melihat produk kerajinan tangan, dibandingkan dengan Mesir, masih jauh lebih baik produk Indonesia, atau khususnya Jawa Barat,” tegas Bismark.

“Saya yakin semakin-yakinnya tentang keunggulan produk kita. Hanya saja peluangnya saja yang masih belum ketemu. Kan kunci ekspor itu hanya satu, yakni bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan para pembeli. Kalau sudah jalan, ya go ahead-lah pasti,” tutur Bismark.

Menurut Bismark, secara keseluruhan ia tidak melihat adanya situasi hambatan di Irak, tetapi melihat peluang. “Ternyata peluang untuk produk kerajinan tangan, kopi, kehutanan, busana Muslim, pakaian, termasuk batu-batuan, masih sangat

besar. Jadi kita punya potensi yang luar biasa menurut saya. Jangan melihat dari sisi hambatan, tetapi coba melihat ke depan, bisa nggak kita masuk. Tentu saja tidak bisa langsung besar, tetapi sedikit demi sedikit beberapa teman pelaku usaha sudah memulai,” tambahnya.

Dalam menyikapi pasar Irak, pengusaha Indonesia perlu mengubah pola pikirnya, yang menganggap pasar ekspor hanya sebagai tambahan atau pelengkap dari pasar dalam negeri. Ekspor itu, termasuk gagasan untuk ekspor ke Irak, sebetulnya adalah bidang yang membutuhkan perhatian dan upaya tersendiri.

Hal itu dinyatakan Direktur Ekspor PT Ikafood Putramas, Boy Gaswin Zen, yang datang mewakili perusahaannya di Baghdad International Fair. Ia juga mewakili Ikapharmindo, perusahaan yang berada dalam satu grup dan berfokus pada produk obat-obatan, perawatan kecantikan, dan consumer goods, seperti sabun, perawat rambut, dan sebagainya.

Menurut Boy Zen, tantangan yang dihadapi dalam melebarkan bisnis ke Irak adalah menemukan mitra lokal yang tepat. Ada keunikan di kawasan Timur Tengah, termasuk di Irak, bahwa mitra lokal sering meminta untuk menjadi satu-satunya perwakilan di wilayah ini, sehingga menutup pintu bagi potensi mitra lokal lain. Maka pemilihan mitra lokal harus disikapi secara cerdas, dengan mempertimbangkan banyak hal.

Ekonomi Irak akan Berkembang

Boy Zen tetap berminat datang ke Irak, yang sering diberitakan di media sebagai negeri yang banyak dilanda konflik, karena melihat potensi di masa depan. “Kami sudah mulai mengeksport sejak 1995 ke negara-negara lain, dan salah satu strategi perusahaan kami adalah ke negara yang diperkirakan ekonominya

Produk Indonesia yg dipamerkan dalam pameran perdagangan Baghdad.

akan berkembang,” tutur Boy Zen. “Kita yang penting eksis dulu di Irak walaupun kecil dan memperkenalkan produk. Nanti, pada saat kondisi di Irak membaik, kita harapkan produk kita sudah lebih dulu dikenal dibandingkan produk pesaing yang masuk belakangan.”

Hal senada dinyatakan Marketing Export Dept. Manager dari PT. Voksel Electric Tbk, Harris Wijaya, yang datang mewakili perusahaannya di Baghdad International Fair. Tanpa banyak publikasi, lewat PT. Voksel Electric, Indonesia ternyata telah mengekspor produk telekomunikasi seperti kabel dan konduktor ke Irak. Infrastruktur telekomunikasi Irak yang rusak, usang, dan terbengkalai akibat konflik berkepanjangan di negeri itu memang membutuhkan banyak infrastruktur baru. Indonesia berusaha mengisi kekosongan itu.

Menurut Harris, dalam kontrak terakhir dari awal 2014 hingga Mei 2014, nilai kontrak yang diperoleh perusahaannya mencapai 12 juta dollar AS. Sedangkan kalau dihitung sejak awal keterlibatan di Irak, bisa mencapai 20 juta dollar AS. Sekarang Harris sedang berusaha untuk meraih kontrak baru. “Kami sudah sejak 2008 berusaha mengekspor ke Irak, namun baru tahun 2012 tercapai deal. Tentang kontrak terbaru, kami masih negosiasi tentang term of payment,” ujarnya.

Tentang situasi yang dianggap belum stabil di Irak, Harris berpendapat, justru dalam kondisi demikianlah terdapat peluang bagi perusahaannya. Perusahaan-perusahaan besar dari Amerika dan Eropa masih menahan diri untuk masuk ke Irak. “Tetapi jika kondisi sudah benar-benar pulih, raksasa-raksasa itu akan masuk ke Irak dan akan makin sulit bagi kita untuk bersaing melawan mereka,” jelas Harris, yang sudah tiga kali berkunjung ke Irak.



Memberi Apresiasi yang Tinggi

Para pelaku usaha Indonesia, yang mencoba memasarkan produk-produknya di pameran perdagangan internasional di Baghdad, memberi apresiasi yang tinggi terhadap bantuan dan dukungan penuh yang dilakukan KBRI Baghdad. “KBRI ikut mendukung pelaku usaha Indonesia asal Jawa Barat untuk tembus ke pasar ekspor. Ini sesuatu yang luar biasa, karena saya lihat mereka all out,” ujar Bismark.

“Dukungan dari KBRI Baghdad, terus terang, saya bisa mengatakan adalah salah satu yang terbaik yang pernah kami terima. Baik dari Pak Dubesnya, Wakil Dubesnya, dan semua staf di sana. Mereka terus ada lho di stand kita. Mereka tunggu dari pagi sampai sore,” puji Boy Zen.

Sedangkan pimpinan PT. Kamakmuran Niaga Mandiri, Didiet Arry Suparno, berpendapat, “Dukungan dari KBRI Baghdad sangat membantu sekali. Luar biasa dalam memfasilitasi kami semua. Kami diperhatikan dengan baik dalam segala hal. Sampai untuk mesin kopi pun, kami tidak bawa dari Indonesia, tetapi KBRI menyediakan, hingga mereka membeli baru. Hal seperti ini jarang terjadi. Ini hanya satu-satunya terjadi di (KBRI) Baghdad.”

Didiet adalah pengusaha UKM asal Bandung yang bergerak di komoditi kopi. Kapasitas produksi UKM Didiet untuk konsumsi dalam negeri adalah 10 ton per bulan. Sedangkan untuk pasar luar negeri tergantung permintaan, tetapi untuk tahun depan sudah punya kontrak dengan mitra di Hongaria sebesar 20 ton. Kebun kopi binaan UKM Didiet berlokasi di Garut, Sumedang, Bandung Barat, dan Pengalengan, Jawa Barat.

Dari sudut pandang KBRI Baghdad, para pelaku usaha dari Indonesia, yang mau datang dan berpartisipasi untuk mencari pasar di negara seperti Irak, juga patut mendapat apresiasi tinggi. “Saya pribadi sangat salut. Sangat apresiatif pada teman-teman pelaku usaha ini, yang dari segi kapital dan kapasitas produksi biasa-biasa saja, tetapi punya semangat yang luar biasa untuk menghadirkan Merah-Putih dalam berbagai produknya di Irak ini. Mereka patut mendapat apresiasi atas kemauannya datang ke Irak,” kata Ari.

Perlu Membangun Kepercayaan

Untuk pasar-pasar yang dinamis, tetapi memiliki kendala keamanan yang muncul setiap hari seperti

Irak, pihak KBRI Baghdad perlu membangun kepercayaan agar para pelaku usaha mau berpartisipasi di pameran. Untuk mewujudkan keinginan KBRI itu membutuhkan suatu perjuangan tersendiri di lapangan.

“Sementara mereka para pelaku usaha itu setiap hari membaca berita tentang adanya bom, maka kita harus membangun kepercayaan. Ketika mereka memutuskan datang ke Baghdad, ya berarti kepercayaan itu sudah terbentuk, sebagai hasil dari kalkulasi mereka sendiri,” lanjut Ari. Kementerian Luar Negeri RI memang sudah mengklasifikasikan tempat penugasan yang dianggap rawan dan berbahaya, dan Irak termasuk salah satu yang dianggap paling berbahaya.

“Sangat mudah untuk mengundang pelaku usaha, jika kita bertugas di negara-negara Eropa atau Amerika. Jalinan hubungan usaha antara negara itu dan Indonesia sudah terbangun. Tetapi dengan Irak kan baru satu pelaku usaha di sini, satu lagi di sana. Sifatnya baru sporadis, spontan, tidak berkesinambungan. Tetapi kita kan ingin yang sifatnya berkelanjutan,” tutur Ari.

Untuk menggenjot ekspor ke Irak tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada saja satu dua kendala yang harus diatasi. Masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh eksportir komoditi dari kelompok UKM adalah masalah perbankan. Pemerintah telah memberi kebijakan ekonomi jilid I, II, III, dan IV. Tetapi praktiknya di lapangan, pihak perbankan itu masih sangat kaku dalam perlakuan terhadap pengekspor, terutama untuk kelompok UKM yang mau melakukan ekspor kopi. Hal itu dinyatakan Didiet Arry Suparno, yang perusahaannya menghasilkan kopi spesial, dengan brand Paris van Java.

Berbagai Tantangan ke Irak

Didiet memberi contoh, pihaknya harus membeli kopi dengan uang kontan, dalam upaya perusahaan untuk melaksanakan ekspor 200 ton kopi tahun 2016 ke Budapest,

Hongaria, sesuai permintaan pasar. “Tetapi berapa besar sih kemampuan uang saya untuk memperoleh biji kopi sebanyak itu? Pemerintah saat ini telah memberi kebijakan kredit dengan jaminan yang berbasis komoditi. Namun praktiknya di lapangan, perbankan itu seperti bersikap setengah-setengah,” ujar Didiet.

Menurut Didiet, ketika mengambil kredit ke bank, pihaknya tetap harus menyediakan collateral atau jaminan lain, padahal ia membeli biji kopi untuk ekspor itu dengan uang. “Uang kita itu sudah habis untuk membeli kopi. Tetapi kita tetap harus memberikan collateral berupa aset tetap, seperti tanah, dan sebagainya,” sambungnya.

Pada hal, kata Didiet, asetnya sendiri sudah dikeluarkan untuk membeli kopi. “Seharusnya pemerintah bisa memberi lebih banyak peluang pada kami para eksportir, terutama pelaku komoditi. Agar komoditi kami, stok kami itu, bisa dijadikan jaminan collateral,” ujarnya.

Yang lucunya lagi, menurut Didiet, LC yang dimilikinya itu jika dimasukkan ke perbankan di Indonesia juga tidak bisa dijadikan jaminan. Bagi pihak perbankan, LC itu bukan collateral. Jadi Didiet tetap saja harus menjaminkan aset tetap, seperti tanah, rumah, dan segala macam. “Saya tetap harus kasih fixed asset. Saya sudah datang ke empat bank termasuk BRI, BJB, Mandiri, dan jawabannya itu sama. Kebijakan dari Bank Indonesia-nya yang belum berubah. Jadi bank-bank itu bukannya tak mau, tetapi yang harus berubah itu peraturan BI-nya,” lanjut Didiet.

Hambatan Bisa Diatasi

Mengomentari kendala itu, Ari Wardhana mengatakan, masalah LC dalam upaya peningkatan ekspor Indonesia ke negara berkembang seperti Irak, adalah hal klise. Tentang LC dari Irak yang tidak diterima sebagai jaminan oleh perbankan di Indonesia, Ari menganggap, hal

itu bukanlah masalah yang tak bisa diatasi.

Ari, yang pernah menjadi Koordinator Fungsi Ekonomi di KBRI Aljazair, memaparkan, ada mekanisme lain yang bisa difasilitasi. “Misalnya, kita waktu itu bilang pada perusahaan Aljazair untuk buka account di bank, katakanlah Bank Pariba di Paris. Bank Pariba di Paris kan berkorespondensi dengan Bank Pariba yang ada di Indonesia. Maka itu bisa dilakukan transfer untuk melakukan pembayaran. Bisa diakali begitu. Jadi tidak sampai menghambat bisnis antara kedua negara. Banyak cara yang bisa kita gunakan,” ujarnya.

“Jadi masalah mekanisme pembayaran seperti itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Dan kita wajib memberi dukungan pada pengusaha Indonesia agar hal itu bisa terealisasi,” tegas Ari.

Ia mengambil contoh, perusahaan konstruksi Wijaya Karya (Wika) sudah membangun jalan raya di Aljazair, dan sekarang sedang membangun apartemen di sana. Nilai revenue-nya itu sekitar Rp 1 triliun setiap tahun. Padahal, tidak ada kerjasama antara bank sentral Indonesia dan Aljazair.

“Tetapi apakah hal itu menjadi hambatan? Wika tetap hadir, dari 2006 sampai sekarang, dengan omzet antara Rp 600 miliar sampai Rp 1 triliun per tahun. Saya yakin ada masalah, tetapi apakah itu menghambat kerjasama antara mereka di Indonesia dan Aljazair? Justru saling melengkapi ‘kan?’ tukasnya.

Tantangan lain untuk masuk ke pasar Irak adalah pemahaman tentang selera dan perilaku konsumen di Irak. Minat masyarakat Irak terhadap produk pangan, seperti bumbu masak, dari Indonesia agak sulit dipenuhi, antara lain karena perbedaan antara selera orang Indonesia dan selera orang Irak. Maka mungkin strategi pemasarannya adalah menjual produk pangan yang umum, seperti saus cabai atau saus tomat, karena produk itu dikenal di seluruh dunia. • Satrio Arismunandar

Perubahan Seksual Fortingall Yew



Sebuah pohon tertua (berusia 5000 tahun) di Eropa yang dijuluki "Fortingall Yew" sejak lama sudah diidentifikasi sebagai pohon jantan. Namun, berdasarkan penelitian terakhir, sebagian tubuhnya mengalami perubahan seksual menjadi betina.

Ahli Botani dari Royal Botanic Garden Edinburgh membuktikan bahwa buah yang dihasilkan pohon Yew itu ternyata mampu memproduksi buah layaknya jenis betina pada salah satu cabang pohon tua yang keriput tersebut.

"Saya sangat terkejut melihat beberapa buah dimana fakta sebelumnya menyatakan bahwa pohon itu jenis jantan," demikian kata Dr. Max Coleman, seorang pembicara sains dari Royal Botanic Garden Edinburgh.

Selama berabad-abad tumbuh lebat di habitatnya pedesaan Fortingall, Perthshire, Skotlandia, pohon Yew itu tercatat sebagai jenis jantan karena memiliki tunas yang menghasilkan serbuk sari. Namun demikian, Coleman mengakui bahwa perubahan seks yang tidak pernah terdengar di pohon Yews sampai saat ini dan jenis pohon lainnya.

Sekedar informasi, jenis kelamin (seks) pada tanaman



atau pohon adalah kunci untuk kemampuan mereka dalam mereproduksi melalui penyerbukan, meskipun terkadang lebih dari satu tanaman berbunga perlu hadir untuk memastikan sehat penyerbukan silang terjadi.

Bunga jantan memiliki benang sari yang menghasilkan serbuk sari, dan bunga betina memiliki putik yang menerima serbuk sari. Tak jarang, angin bertindak sebagai penyerbuk utama tanaman dengan bunga seperti, serbuk sari bergerak dari bunga jantan ke bunga betina secara acak.

"Beberapa pohon, seperti pohon Ash, secara rutin dapat mengubah jenis kelamin (seks). Tapi seperti Yew, melakukan hal demikian sangat jarang terjadi," katanya dengan nada heran.

"Kami tidak sepenuhnya memahami mengapa fenomena itu timbul, tapi mungkin ada hubungannya dengan memaksimalkan peluang reproduksi dan bisa faktor pemicunya adalah lingkungan, usia atau ini benar-benar fenomena alam."

Pohon Yew pada umumnya berjenis kelamin jantan atau betina. Namun perubahan kelamin bisa terjadi jika ada pergeseran dalam keseimbangan zat pengatur tumbuh dalam sebuah pohon, atau hormon, demikian The Washington Post melaporkan.

Terkadang ada pohon bahkan bisa mempertahankan dua jenis kelamin sekaligus untuk waktu yang lama. Dan, ini mungkin telah dialami oleh pohon Yew ini. "Jenis betina yang disebut 'Fry' diamati pada cabang betina pada Fortingall Yew pada tahun 1996 silam," kata Coleman.

Dia mengaku sangat heran, dengan penemuan terbaru yang dilihatnya itu, usai penemuan itu diumumkan ke publik. "Tampaknya ini berasal dari cabang yang sama. Dan, ini memberikan beberapa bukti tentatif bahwa cabang ini adalah betina untuk setidaknya selama 20 tahun."

Meskipun pohon itu berusiatua, tapi Fortingall Yew tampak subur dan cukup untuk mempertahankan 'gaya hidup' interseks alaminya. Coleman mengatakan, bahwa ia bersama rekannya, berencana untuk terus mengamati dan mendokumentasikan jenis kelamin (betina atau jantan) pada pohon tersebut. • Ferro Maulana

Di Bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial

Oleh: Iman Zanatul Haeri
Pustakawan di Perpustakaan Kandang Buku

Membaca karya Anderson, kita tidak dapat mereduksinya menjadi satu tema pusat dan memahami struktur narasinya sebagai narasi tunggal. Terlebih bahwa judul buku ini sudah menyiratkan hal tersebut.

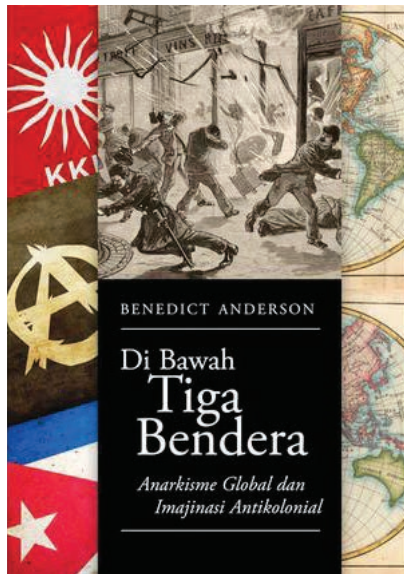
Penulis buku ini membawa pembaca pada situasi dan pemahaman perubahan politik tiga negara di akhir abad ke 19. Spanyol sebagai simbol kekuatan kolonial tertua saat itu tengah sakit keras. Di lain sisi Kuba dan Philipina sebagai wilayah koloni terakhir Spanyol, saat itu terjadi pergolakan politik akibat berkembangnya tren politik baru saat itu: anarkisme, nihilisme, gerakan demokrasi yang terlambat, marxisme, komunisme dan nasionalisme yang selalu berkawin silang dengan ideologi-ideologi tersebut.

Telaah lebih lanjut dari kajian dalam buku ini ternyata lebih luas dari yang kita kira. Misal, hubungan antara situasi politik yang terjadi di Perancis, Jerman, Russia, dan Amerika Serikat. Ternyata semua saling berhubungan dengan munculnya anarkisme dan sikap antikolonial yang melewati batas-batas benua.

Lebih menarik lagi, bahwa beberapa pelaku anarkisme dan penyebaran ide anti-kolonial itu dibahas juga secara rinci. Ini memungkinkan pembaca memahami lebih lanjut pilihan-pilihan politik dan persinggahannya ke beberapa negara.

Untuk tema besar antikolonial, dalam buku ini membahas soal Jose Rizal tentang kehidupannya, pikirannya dan terutama “dibalik” dua novel besarnya Noli Me Tangere (Jangan Sentuh aku) dan El Filibusterismo (Subversif).

Sikap antikolonial Jose Rizal “satu paket” dengan sikap antikatolik. Sebab sampai titik akhir, Roma selalu menunjukkan sebagai pendukung utama politik kolonial Spanyol. Ditambah dengan perilaku tidak adil pihak katolik Philipina lewat penyerobotan tanah keluarga Rizal sebagai respon atas kritik Rizal terhadap Katolik dalam novelnya. Dan beberapa peristiwa penting lain



Judul Buku: **Di Bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial**
Penulis: **Benedict Anderson**
Penerjemah: **Ronny Agustinus**
Penerbit: **Marjin Kiri**
Tahun Terbit: **2015**
Tebal: **ix + 378 halaman**

seperti Rizal tidakizinkan menikah secara katolik.

Tetapi kemalangan Jose Rizal tidak hanya itu. Rencana Rizal untuk hidup damai di sebuah wilayah di pulau Kalimantan gagal. Nama besarnya malah merugikannya. Perilaku “santunnya” yang tidak mengubah keputusan penangkapan atas dirinya sampai keputusan hukum eksekusi, dan berkali-kali berusaha menunjukkan ketidakterlibatannya atas perlawanan terhadap penguasa kolonial melalui surat-suratnya terhadap Fernando Blumentritt yang sangat mengharukan “*Saudaraku tercinta, saat Engkau menerima surat ini, aku sudah tidak ada. Esok pada pukul 7, aku akan ditembak; namun aku tidak bersalah atas tuduhan melakukan pemberontakan.*”

Dalam novelnya, Jose Rizal mampu menyajikan secara imajinatif soal

Nasionalisme Philipina yang jadi motor pemberontakan Katipunan. Di sisi lain, anarkisme juga mulai tumbuh di Philipina sebagai akibat perpecahan organisasi Komunis internasional.

Berbagai upaya pemberontakan dan aksi anarkisme untuk menjatuhkan kekuatan kolonial ternyata tidak hanya di Spanyol. Tapi Perancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Russia. Pembunuhan tokoh-tokoh politik yang terjadi saat itu tersebut disokong langsung oleh ditemukannya dinamit oleh Alfred Nobel. Teror bom dimana-mana.

Di sisi lain kekuatan nasionalisme secara global ternyata sudah menyentuh daratan Tiongkok dan Jepang sebagai tempat pengasingan yang nyaman. Lalu bagaimana peristiwa di Kuba? Dan peran Tarrida yang cukup penting lewat artikel-artikelnya yang tajam soal kemerdekaan Kuba, Puerto Rico dan penjara Montjuich, sebuah penjara yang paling kejam di Spanyol yang justru semua orang mengetahuinya melalui tulisan Tarrida.

Anarkisme sebagai kekuatan baru yang menakutkan kekuasaan kolonial, serta kekuatan antikolonial yang imajinasinya mampu melewati batas-batas bahasa dan geografi mulai bermunculan. Dan diartikan sebagai kekuatan Zaman Globalisasi Pertama yang meletus pada akhir abad ke-19.

Narasi ini kemudian dirangkai dengan kisah-kisah unik yang tidak mampu dijelaskan oleh kajian oleh sebuah dimensi keilmuan. Disinilah peran besar Ben Anderson seperti layaknya seorang Astronom Politik. Meneropong sejarah layaknya cahaya bintang melalui kegelapan dan imajinasi.

Cukup mengejutkan, bahwa untuk memahami babak baru Globalisasi pertama ini, Ben Anderson mengutip istilah yang hanya ditemukan di Indonesia, seperti ditulis Sutan Sjahrir. Ketika itu Sjahrir mencoba untuk menggambarkan kondisi saudara sebangsanya pada perjuangan kemerdekaan tahun 1945 dengan istilah “Gelisah”. Suatu kata yang sulit dicari padanan katanya dalam bahasa Inggris, yang makna semantiknya meliputi Anxious (cemas), trembling (gemetar), unmoored (tanpa pegangan), expectant (menanti-nanti). ◦

Tinggal Seorang Diri di Surga

Satrio Arismunandar

Jika Anda sering menyempatkan diri mengamati berbagai isi media daring (online) dan media sosial tentang Indonesia saat ini, Anda mungkin akan segera merasa lelah, capek, lunglai. Persisnya, lelah secara mental. Pagi berlangit cerah cemerlang, yang seharusnya bisa Anda nikmati, berubah menjadi mendung hitam yang suram, penuh energi negatif.

Mengapa? Hal itu karena media tersebut penuh dengan konten yang bernuansa konflik, kebencian, permusuhan, antipati, prasangka, ketakutan, sikap paranoid, kecurigaan, kata-kata kasar, caci maki, dan lain-lain. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, semua ekspresi itu berlandaskan pada satu anggapan dari person bersangkutan: “Saya adalah yang paling benar, dan mereka yang tidak sama dengan saya berarti salah.” Titik.

Mereka yang menganggap diri paling benar tersebut seolah-olah tidak pernah kekurangan bahan dan punya banyak energi untuk menghujat, mencerca, menghina, melecehkan, bahkan mengkafir-kafirkan pihak lain, yang dianggap tidak sesuai dengan kebenaran menurut versinya. Hal yang terakhir ini biasanya terkait dengan klaim kebenaran dalam konteks keagamaan.

Karena menganggap ajaran agama yang dianutnya paling benar (atau lebih tepat: penafsirannya terhadap ajaran agama yang dianutnya paling benar), mereka tidak merasa bersalah mengkafir-kafirkan pihak lain. Sebaliknya, mereka justru merasa sedang mengemban tugas yang mulia di mata Tuhan. Yakni, tugasnya adalah meluruskan semua yang bengkok, untuk membenarkan kembali semua yang keliru, dan mengembalikan ke jalan lurus bagi siapa saja yang dianggapnya sudah menyimpang atau tersesat.

Dalam “logika kebenaran tunggal” versi mereka, secara simplistik dan sederhana mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya punya satu wajah, tidak ada alternatif lain. Warna hanya ada dua: putih (benar) dan hitam (salah). Tidak ada warna abu-abu. Bahkan tidak ada warna kuning, biru, hijau, ungu, merah, dan oranye. Ini warna-warna yang tidak dikenal, dan kehadirannya menimbulkan kebingungan.

Mereka gamang dan tidak terbiasa dengan keanekaragaman. Perbedaan dianggap sebagai

penyimpangan dari kebenaran, karena kebenaran hanya ada satu, yakni kebenaran menurut versi mereka sendiri. Perbedaan dianggap sebagai ancaman, atau bahkan musuh yang harus diperangi.

Sudah tentu ada perbedaan yang nyata di antara berbagai agama. Bahkan di dalam agama yang sama juga terdapat perbedaan dalam fiqih (hukum agama), ritual, sekte, aliran, dan mazhab. Singkat kata, jika kita terus mau menggali-gali perbedaan yang ada, maka tidak pernah akan ada habisnya. Dan di ujung-ujungnya, jika kita konsisten menggunakan pendekatan radikal ekstrem, sesungguhnya tidak ada dua manusia yang memiliki versi kebenaran yang persis sama.

Setiap orang memiliki versi kebenaran sendiri-sendiri. Dan, manakala dia memutlakkan versi kebenaran yang dianutnya sebagai satu-satunya kebenaran, maka dia akan menjadi orang yang paling kesepian, di dunia maupun di akhirat. Mengapa?

Karena dalam versi surga yang dia anut, kalau dia konsisten dengan pendekatan radikal ekstrem, sesungguhnya hanya dialah satu-satunya orang yang layak masuk surga! Hal itu karena tidak ada satu pun manusia lain yang menganut versi kebenaran yang persis seperti versi dirinya. Jika jumlah manusia ada 1.000.000.000, maka 999.999.999 orang akan masuk neraka dan hanya dirinya seorang yang masuk surga! Inilah gambaran ekstrem ketika seseorang memutlakkan versi kebenaran yang dianutnya sebagai satu-satunya kebenaran.

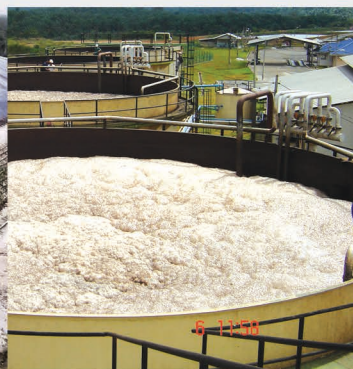
Padahal perbedaan, termasuk perbedaan dalam menafsirkan kebenaran, seharusnya adalah rahmat. Kebenaran itu sangat besar, terlalu besar untuk dimonopoli sendiri. Kebenaran itu seperti gajah, sedangkan kita seperti orang-orang buta yang berusaha mengerti gajah dengan cara meraba-raba.

Ada yang meraba kuping gajah dan menyimpulkan bahwa gajah itu tipis seperti kipas. Ada yang meraba kaki gajah, dan berpendapat bahwa gajah itu seperti batang pohon kelapa. Masing-masing merasa telah mengerti gajah atau menemukan kebenaran tentang gajah. Namun kebenaran dalam versi kita itu mungkin baru satu aspek, satu sisi, satu sudut kecil dari kebenaran yang seutuhnya. ◦

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



www.ebtke.esdm.go.id



Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

DIREKTORAT BIOENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng Jakarta Pusat 10320

☎ 021-39830077 📠 021-31901087 ✉ info@ebtke.esdm.go.id



proteksi dan investasi maksimal

js plan
optima 9

Di saat sulit menemukan produk Asuransi Jiwa yang memberikan kepastian Nilai Investasi disamping jaminan proteksi, **Jiwasraya** hadir untuk Anda memberikan kepastian nilai investasi dalam bentuk polis Asuransi Jiwa disamping kepastian proteksi.

js Plan Optima 9 sebagai sebuah produk Asuransi Endowment dengan Masa Asuransi 4 atau 5 tahun dengan pembayaran premi sekaligus saat mulai pertanggunggunaan asuransi.



Official Insurance Partner of Manchester City Football Club
in Indonesia



ASURANSI JIWA PENDIDIKAN PENSIUN INVESTASI ANUITAS KESEHATAN

www.jiwasraya.co.id

CALL 021 1500151